

SKRIPSI
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK*
***RESPONSE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS) BANK**
SYARIAH PADA UMKM DI KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

Syazana Nadhifa
NIM. 190603050

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 144 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syazana Nadhifa
NIM : 190603050
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 April 2024

Yang Menyatakan


Syazana Nadhifa



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) BANK SYARIAH PADA UMKM DI
KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Syazana Nadhifa
NIM: 190603050

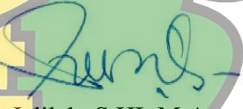
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Hafas Furgani, m.ec
NIP. 198006252009011009

جامعة الرانيري


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Bank Syariah Pada UMKM di Kota Banda Aceh


Syazana Nadhifa
NIM: 190603050


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi *Sirata Satu* (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

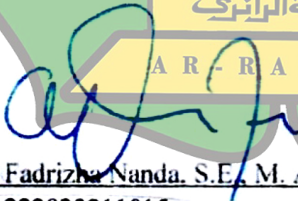
Sekretaris



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.ec
NIP. 198006252009011009


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Penguji I

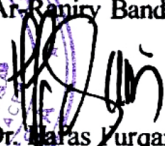
Penguji II


Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M. Acc., Ak
NIP. 198511222023211015


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 19801302018031001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syazana Nadhifa
NIM : 1906033050
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603050@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:
Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Bank Syariah Pada UMKM di Kota Banda Aceh.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 April 2024

Mengetahui,

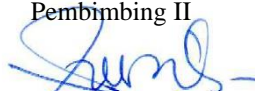
Penulis


Syazana Nadhifa
NIM: 190603050

Pembimbing I


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II


Jalilah, S.Ht., M.Ag
NIP.198806082023212040

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul *"Pengaruh Persepsi, Preferensi Dan Literasi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Pegadaian Syariah (Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cps Blangpidie, Aceh Barat Daya)"* Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

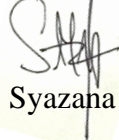
1. Prof. Dr. Hafas Furqani. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA., Ek sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta Mukhlis, SH.I., S.E, M.H., selaku staf akademik yang telah banyak membantu.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan arahan dalam menulis skripsi ini
4. Prof. Dr. Hafas Furqani. M.Ec selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Teuku Syifa Fdrizha Nanda, S.E., M. Acc., Ak selaku penguji I dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. selaku penguji II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.

6. Seluruh Staff dan Dosen-dosen Fakultas Ekonmi dan Bisnis Program Studi yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam- dalamnya penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua terhebat. Ayahanda Bakhtiar dan ibunda Rosidah. Beserta Kakak Syaikhah Novira atas segala doa, cinta, kasih sayang, dorongan, perjuangan dan pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah ini
8. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri.

Banda Aceh, 24 April 2024

Penulis



Syazana Nadhifa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف
hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul Munawwarah
Ṭalḥah : طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Syazana Nadhifa
Nim : 19060050
Fakultas/Prodi Studi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS)Bank Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.ec.
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

Quick Response Indonesian Standard atau biasa disebut QRIS diluncurkan dengan tujuan agar memudahkan transaksi nontunai bagi masyarakat maupun pelaku UMKM di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, kendala serta strategi yang dihadapi masyarakat terutama pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam penerapan QRIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pembayaran QRIS sangatlah membantu pelaku UMKM. Tingkat penerimaan yang tinggi dalam penggunaan QRIS adalah generasi milenial dan generasi Z dalam melakukan transaksi digital pada saat ini. Kendala yang dialami pelaku UMKM, masih kurangnya pemahaman masyarakat, jaringan internet, dan biaya layanan dari nilai transaksi pembayaran. Strategi atau solusi yang akan dilakukan oleh bank adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku UMKM tentang manfaat yang dirasakan ketika menggunakan QRIS.

Kata kunci: Quick Response Indonesian Standard (QRIS), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Bank Syariah.....	12
2.2 Sistem Pembayaran.....	19
2.2.1 Pengertian Sistem Pembayaran.....	19
2.2.2 Jenis Sistem Pembayaran.....	22
2.3. <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i>	28
2.3.1 <i>Quick Response Code</i>	28
2.3.2 Pengertian Quick Response Indonesian Standard (QRIS).....	30
2.3.3 Jenis pembayaran menggunakan QRIS.....	33
2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	36
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	36
2.4.2 Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	39
2.4.3 Karakteristik Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	41
2.4.4 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	43
2.5 Penelitian Terdahulu.....	46
2.6 Kerangka Berpikir.....	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Desain Penelitian.....	53
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5 Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh	58
4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	58
4.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.....	60
4.2 Tahapan Pembuatan <i>Quick Response Indonesia Standard</i> (QRIS).....	65
4.3 Implementasi Sistem Pembayaran <i>Quick Response</i> <i>Indonesian Standard</i> (QRIS) pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.....	68
4.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pembayaran <i>Quick Response Indonesian Standard</i> (QRIS) pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh	75
4.2.3 Strategi dan solusi agar <i>Quick Response Indonesian</i> <i>Standard</i> (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diimplementasikan secara meluas	82
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era globalisasi saat ini, maka tidak dapat dipungkiri terjadinya pergeseran perubahan teknologi yang semakin menggantikan peran manusia termasuk dalam hal transaksi keuangan. Dimana kemajuan globalisasi ini telah memberikan atau membawa inovasi baru dalam penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Salah satu inovasi tersebut adalah terciptanya alat pembayaran uang elektronik. Perubahan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai menjadi non tunai, dimana pembayaran non tunai berkembang pesat disertai dengan beberapa penyempurnaan yang menjadikan penggunaannya lebih efisien, aman, cepat dan mudah (Harahap, 2020).

Adapun perkembangan inovasi sistem pembayaran di Indonesia semakin pesat seiring dengan dukungan pemerintah dengan memberikan fasilitas berupa inovasi infrastruktur teknologi informasi. Saat ini melakukan transaksi pembayaran dapat melibatkan pihak bank maupun non bank. Dengan demikian, saat ini terjadi pengeseran dari pembayaran yang menggunakan *paper based* instrument ke *card based* dan *electronic based* instrument. Perkembangan uang elektronik (electronic money/e-money) bukan disebabkan oleh Bank Indonesia, melainkan oleh

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan uang elektronik. Uang elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Penggunaan uang elektronik lebih nyaman daripada menggunakan uang tunai (dalam transaksi bernilai kecil) karena pelanggan tidak perlu memiliki sejumlah uang pas untuk transaksi.

Penggunaan uang elektronik saat ini sudah memiliki beragam bentuk salah satunya adalah *Quick Response Indonesian Standard* atau biasa disebut QRIS yang diluncurkan pada Agustus 2019 Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran di Indonesia meluncurkan kanal pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* untuk instrument pembayaran yang berbasis server. Salah satu alasan peluncuran kanal pembayaran ini karena pedagang di pasar perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penerbit ketika bertransaksi non-tunai. QRIS dapat digunakan pada aplikasi pembayaran yang telah terinstal di *smartphone* yang telah terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi yang dimaksud adalah *e-wallet* (dari penerbit perbankan maupun non perbankan) yang digunakan sebagai alat pembayaran berbasis server dan telah disetujui oleh Bank Indonesia. Sementara waktu, Bank Indonesia masih mengeluarkan QRIS yang bermode *Merchant Payment Mode* (Sihaloho, Ramadani, Rahmayanti, 2020).

Implementasi QRIS sebagai alat untuk melakukan transaksi berbasis kode QR adalah suatu solusi dalam melakukan pembayaran. Dalam menggunakan QRIS memberikan inovasi yang dapat membuat pembayaran lebih aman, cepat dan praktis. Penerapan sistem pembayaran non tunai yang digunakan untuk pembayaran online diiringi dengan pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat. Dengan menggunakan kode QR sistem akan menstandarisasi semua pembayaran non tunai menggunakan sistem pembayaran QRIS. Salah Satu alasan mengapa QRIS dikeluarkan adalah karena pelaku UMKM perlu menyediakan beberapa kode QR dari penerbit yang berbeda untuk melakukan transaksi non tunai. Dengan adanya beberapa jenis aplikasi digital, penjual harus menyediakan beberapa layanan kode QR dengan jumlah yang sama dengan jumlah aplikasi tersebut. Karena berbagai macam kode QR konsumen memiliki kerepotan sendiri untuk melakukan pemindaian kode QR karena kode QR memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda.

Penggunaan QRIS tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat salah satunya adalah memberikan kemudahan transaksi dan mendukung para pedagang dalam melakukan transaksi perdagangan termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya QRIS ini membantu transaksi jual beli menjadi lebih mudah dan praktis. Namun seiring perkembangan zaman dengan adanya kemajuan teknologi dan

digitalisasi UMKM pun mau tidak mau sudah diharuskan memiliki QRIS untuk mendukung perkembangan.

E-money, saat ini menjadi salah satu alat pembayaran utama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan e-money seperti QRIS dinilai menjadi alasan utama diterimanya transaksi cashless sebagai alternative pembayaran di Indonesia dikarenakan UMKM memberikan kemudahan dengan menyediakan berbagai macam pilihan sistem pembayaran salah satunya dengan QRIS. *Head of Research ASEAN DealStreet Asia*, Andi Haswidi, 2022 mengatakan bahwa hasil survey menunjukkan bahwa 48% UMKM sudah mengadopsi dompet digital serta menempatkan QRIS di konter kasir agar memudahkan pelanggan melakukan pembayaran.

Adanya pembayaran nontunai melalui kode QR memudahkan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan scan code yang disediakan penjual. Penjual tidak perlu lagi mencari uang dalam nominal kecil untuk mengembalikan uang pembeli dan pembeli tidak perlu membawa uang tunai saat melakukan pembelian. Pembayaran nontunai juga mencegah pedagang menerima uang palsu dalam bertransaksi. Mengingat manfaat dalam membantu transaksi nontunai secara lebih efisien, pengguna QRIS oleh UMKM akan dapat membantu meningkatkan kinerja usahanya.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR yang digunakan di Indonesia untuk memudahkan

pembayaran dan transaksi keuangan elektronik. UMKM di Indonesia dapat menggunakan QRIS untuk menerima pembayaran dari pelanggan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Saat ini UMKM yang sedang menggunakan QRIS untuk mendukung transaksi perdagangan mereka. Berdasarkan laporan Bank Indonesia mencatat, sampai dengan Februari 2023 jumlah pedagang/*merchant* QRIS telah mencapai angka 24,9 juta dengan total jumlah pengguna QRIS sebanyak 30,87 juta.

Namun tidak sedikit para pelaku UMKM yang masih belum tertarik menggunakan QRIS. Penerapan QRIS di sejumlah Bank Syariah saat ini masih memiliki kendala. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wibowo (2020), kendala terbesar dalam implementasi QRIS adalah literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah. Ditambah lagi saat ini Bank Indonesia menetapkan pedagang mikro yang menyediakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dikenakan biaya sebesar 0,3% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha khususnya UMKM.

UMKM merupakan sektor penting yang perlu diperhatikan mengingat kehadiran UMKM bisa menjadi solusi untuk pengetasan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia termasuk halnya di Aceh. Sesuai data Dinas Koperasi dan UMKM Aceh pada tahun 2022 jumlah total UMKM seluruh Aceh adalah 74.810. Merujuk data dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh 2022, jumlah UMKM di Banda

Aceh sebanyak 17.308. Hal ini menunjukkan bahwa pasar di Banda Aceh masih sangat besar, sehingga menjadi peluang baik bagi semua untuk memperkuat ekonomi daerah bahkan nasional. Adapun fokus penelitian ini adalah pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh karna seperti yang diketahui UMKM di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peran konsumen juga sangatlah menentukan keputusan pelaku UMKM untuk mengadopsi metode pembayaran digital seperti penggunaan QRIS. Untuk terus memberikan layanan terbaik kepada konsumen, pelaku UMKM harus siap dengan metode pembayaran kode QR. Minat pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS meningkat dikarenakan minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan QRIS juga meningkat termasuk di Aceh yang mayoritasnya terdiri dari generasi Z dan milenial untuk dapat bertransaksi dalam pembayaran digital secara cepat, mudah dan aman. Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh menyebutkan saat ini pengguna QRIS di Aceh meningkat daripada tahun 2021. Peningkatan itu mencapai empat kali lipat. Pada tahun 2021 hanya sebanyak 34 ribu pengguna. Namun sampai juli 2022 sudah sebanyak 143 ribu. Sedangkan di nasional pengguna QRIS saat ini mencapai 22 juta.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho, Ramadani, Rahmayanti (2020) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Medan pada penelitian ini mengatakan bahwa transaksi pembayaran non tunai harus diikuti dan diterapkan dalam

perkembangan era digital karena alasannya banyak pelanggan menggunakan aplikasi *e-wallet* di smarphonenya, dari tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *Quick Response Indonesian Standard* dapat membantu para pedagang UMKM dan QRIS memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mahyuni dan Setiawan menunjukkan responden memiliki pengetahuan yang relatif baik pada QRIS, responden menilai bahwa penggunaan QRIS memberi manfaat yang cukup penting bagi mereka, yaitu: menguntugkan, memberi alternatif metode pembayaran, dan mudah karena QRIS *barcode* hanyatinggal ditempel di kasir tidak membutuhksn proses yang rumit.

Dilihat dari jumlah pelaku UMKM di Aceh pengguna QRIS tergolong besar terutama di Banda Aceh, dari penelitian ini ingin menganalisis penerapan digitalisasi dari segi transaksi oleh beberapa pelaku UMKM di kota Banda Aceh yang menggunakan aplikasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) untuk sistem pembayaran. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan QRIS pada pelaku UMKM, kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Bank Syariah pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala dalam penerapan *Quick Response Indoensian Standard* (QRIS) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana strategi dan solusi agar *Quick Response Indoensian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diimplementasikan secara meluas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi dan solusi agar *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diimplementasikan secara meluas.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis dan penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada pelaku UMKM di kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan kepada pedagang UMKM untuk turut meningkatkan penggunaan metode pembayaran QRIS agar mempercepat dan mempermudah transaksi dan lebih efektif.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan pengambilan kebijakan terkait dengan pengetahuan metode pembayaran QRIS kepada masyarakat luas, khususnya di bidang perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dan pada kelima bab tersebut didalamnya terdapat sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Secara garis besar berikut pembahasannya:

BAB I Pendahuluan, bab pertama yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, serta sistmatika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan penjelasan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, seperti defenisi, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini yang memaparkan tentang desain penelitian, variable penelitian, defenisi operasional, populasi, dan sampel, jenis dan narasumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan pembahasan, pada bab IV ini berisi analisis dari hasil pengolahan data serta pembahasan tentang temuan hasil yang didapat dari penelitian.

BAB V Kesimpulan, bab V ini merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dengan saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia merupakan suatu induksi akan adanya kemudharatan dari sistem bunga (riba). Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, hal ini merupakan pelopor munculnya bank syariah lain di Indonesia. Terlebih lagi setelah adanya Undang-Undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008, Undang-undang tersebut menjadi pijakan hukum yang kuat serta sebagai bukti pengakuan hadirnya perbankan syariah di Indonesia (Khusna, Pratama 2021).

Bank Syariah merupakan bank yang dikenal dengan bebas riba. Istilah riba diartikan sebagai penetapan bunga ataupun melebihi jumlah dari pinjaman pokok nasabah yang dilakukan secara *bathil* (tidak sah), dan riba menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram. Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama dari bank syariah yakni melakukan penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada nasabah sebagai bentuk pembiayaan dan juga memberi jasa pada bank lain Kasmir (Lubis, Olivia, Susanto, 2020).

Keadaan perbankan islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya Undang-Undang Perbankan Nomor 7

Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomo 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian bank ini adalah yang berpotensi dengan prinsip bagi hasil.

UU No. 21 tahun 2008 Bab pas I ayat 7 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat.

Terdapat empat fungsi bank syariah yang telah diklasifikasikan menurut Wiroso (2011:77), yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi

Manajer Investasi merupakan salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting, fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tergantung pada hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam mengelola dana.

2. Fungsi Investor

Dalam menyalurkan dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanam dana dilakukn dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva prroduktif sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah berfungsi seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lain sebagainya tidak berbeda dengan bank konvensional. Namun, yang sangat diperhatikan adalah tetap menggunakan prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial melalui dana qard (pinjaman kebaikan) atau zakat dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran pnting dalam pengembangan

sumber daya manusia dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

Transaksi yang lazim digunakan pada praktik perbankan syariah ada 5 yaitu (Suharto, 2016):

- a. Transaksi yang tidak mengandung riba.
- b. Transaksi yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (ijarah)
- c. Transaksi yang ditunjukkan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (murabahah)
- d. Transaksi yang ditunjukkan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (mudharabah)
- e. Transaksi deposito, tabungan giro yang imbalannya adalah bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadi'ah)

Bank Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Adapun produk-produk bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana (Funding)
 - a. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cel, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemidahan bukuan. Simpanan giro pada perbankan syariah ada 2 jenis yaitu Rekening Giro Wadi'ah dan Rekening Giro Mudharabah (Alimusa, 2022).

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dengan berbagai ketentuan yang dijelaskan pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikan bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan internet banking. Salah satu ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadi'ah artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena Cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah.

c. Deposito Syariah

Deposito populer untuk berinvestasi oleh masyarakat, selain mudah keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Setiap bisnis atau investasi yang dilakukan oleh bank termasuk dalam kategori halal menurut hukum Islam. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank.

2. Penyaluran Dana (Financing)

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Dapat diartikan murabahah sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk

pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah (Setiady, 2014).

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual.

c. Pembiayaan Istishna

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang anantara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaraan yang disetujui terlebih dahulu (Riani, Efiza, dan Fitri, 2023).

d. Pembiayaan Syariah (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Prinsip ijarah pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya objek transaksinya.

e. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk

menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi (Afgan, 2014).

f. **Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

g. **Pembiayaan Hiwalah (Ahli Utang-Piutang)**

Fasilitas Hiwalah bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal; tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

h. **Gadai (*Rahn*)**

Akad *Rahn* memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yang telah ditentukan

i. ***Qardh***

Qardh adalah pinjaman uang. *Qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang

mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

j. Wakalah

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mewakilkan atau memberikan mandate kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan (Arwanita, Wati, Erniza, dan Syarif, 2022).

k. Kafalah

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn.

2.2 Sistem Pembayaran

2.2.1 Pengertian Sistem Pembayaran

Menurut Mulyadi (2016:5), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dirancang untuk dibuat menurut pola yang teratur untuk membentuk kegiatan utama suatu perusahaan. Dengan demikian pengertian dari tujuan sistem adalah kumpulan racangan yang saling terkait untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Adapun pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai

pemindahan sejumlah uang dari pembayar ke penerima pembayaran.

Sistem pembayaran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dan perbankan Negara. Sistem pembayaran tidak terlepas dari perkembangan uang mulai hinggapembayaran elektronik nontunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat nontunai. Berkembangnya sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dan perbankan Negara (Tarantang, Annisa, Maulidia, Meidinah, 2019).

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana agar memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran muncul bersamaan dengan konsep uang sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua sistem yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai dan non-tunai memiliki perbedaan pembayaran tunai menggunakan uang kartal (kertas dan logam) sedangkan non-tunai menggunakan pembayaran tanpa uang tunai tetapi menggunakan kartu, cek, giro, nota debit, maupun uang elektronik (*chip based and server based*) (Bank Indonesia, 2020).

Pembayaran merupakan bagian penting ketika melakukan kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Dalam perekonomian tidak akan terdapat perdagangan apabila tanpa pembayaran. Dengan berkembang tingginya nilai dan risiko teknologi dan transaksi menjadi sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Sistem pembayaran tidak hanya diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, dan cepat, tetapi juga dibutuhkan di dunia pasar modal yang membutuhkan transaksi yang tepat.

Perkembangan sistem pembayaran masing-masing Negara bergantung pada situasi ekonomi dan sistem keuangan Negara tersebut. Pada awalnya jasa sistem pembayaran di Indonesia melalui PT. Pos. Indonesia. Namun, seiring dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran mulai dijalankan melalui sistem perbankan. Bahkan hingga saat ini, sistem perbankan masih mendominasi perannya dalam sistem pembayaran.

Dalam UU No. 23 Pasal 1 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Hal ini menyangkut

alat pembayaran, prosedur perbankan yang terkait dengan pembayaran dan sistem transfer bank yang digunakan dalam proses pembayaran. Berbagai kendala penggunaan uang tunai mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam menciptakan alat pembayaran non-tunai. Dari empat generasi pertumbuhan pembayaran, dimulai dengan *full-bodied money*, *flat money*, *checking accounts* (rekening giro) terlihat mengalami kecenderungan dari transaksi tunai menjadi transaksi nontunai.

2.2.2 Jenis Sistem Pembayaran

Dimulai dengan *full-bodied money*; *flat money*; *checking accounts* (rekening giro) keempat generasi pertumbuhan transaksi pembayaran terlihat adanya kecenderungan transaksi tunai menuju transaksi nontunai. Saat ini ada dua metode pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembayaran tunai dan nontunai.

1. Tunai

Sistem pembayaran tunai adalah sistem pembayaran barang dan jasa secara tunai dimana pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli kepada penjual. Pembayaran tunai adalah metode pembayaran yang dilakukan secara tunai. Uang Tunai yang dimaksud bisa berupa koin atau uang kertas.

Pembayaran tunai adalah metode pembayaran paling tradisional dan masih banyak digunakan di seluruh dunia. Pada

saat ini, pembayaran nontunai meningkat. Namun banyak orang terus memilih pembayaran tunai. Pembayaran nontunai menuntut konsumen untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi. Oleh Karena itu, ketersediaan uang tunai di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia tetapi menjadi faktor utama sistem pembayaran.

Beberapa keuntungan pembayaran nontunai antara lain:

- a. Mudah: Pembayaran tunai mudah karena tidak memerlukan perangkat khusus seperti kartu kredit atau perangkat seluler.
- b. Tidak ada biaya tambahan: Pembayaran tunai biasanya tidak memerlukan biaya tambahan seperti biaya administrasi atau transfer yang terkait dengan metode pembayaran digital.
- c. Meningkatkan privasi: Pembayaran tunai membantu meningkatkan privasi konsumen karena tidak jejak digital.

Pembayaran tunai masih banyak digunakan, namun perkembangan teknologi dan kemajuan pembayaran digital membuat semakin banyak konsumen beralih ke pembayaran nontunai seperti kartu kredit, Dompot digital, dan transfer bank.

2. Nontunai

Pembayaran nontunai adalah suatu sistem pembayaran yang pada dasarnya dilakukan tanpa menggunakan uang yang beredar atau uang tunai. Sistem pembayaran nontunai merupakan suatu sistem pembayaran yang bisa digunakan sebagai sarana untuk proses

penyampaian, pengesahan maupun instruksi yang dapat membantu kelancaran dari suatu pertukaran nilai antar perorangan maupun pihak lain seperti bank ataupun lembaga dalam negeri serta internasional yang di dalam sistem pembayaran tersebut tersebut

terdapat suatu peraturan, kontrak, teknis, dan fasilitas (Hasrina, 2019).

Harahap (2018:2) menyatakan Transaksi non-tunai merupakan perwujudan dari Sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani sistem perbankan, dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran.

Manfaat transaksi nontunai dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ dan sesuai Peraturan Presiden tahun 2016 yaitu:

- a. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Mencegah peredaran uang palsu
- c. Menghemat pengeluaran Negara
- d. Menekan laju inflasi
- e. Mencegah transaksi illegal (korupsi)

Pembayaran tanpa uang tunai yang umum digunakan di Indonesia antara lain:

1. Transfer bank

Transfer bank adalah metode pembayaran tanpa uang tunai tetapi dengan cara mentransfer dana dari satu rekening

bank ke rekening lainnya. Pembayaran ini dilakukan melalui ATM, internet banking, atau mobile banking.

2. Kartu kredit dan debit

Pembayaran nontunai juga dapat dilakukan dengan kartu kredit atau debit. Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan ditempan dimana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank (Pribadi, 2019).

3. Dompot digital

Dompot digital adalah layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara elektronik dan melakukan pembayaran melalui ponsel pada suatu aplikasi atau internet. Faktor yang mempengaruhi untuk melakukan transaksi menggunakan dompet digital adalah mudah, cepat, dan aman dalam melakukan transaksi (Budiarti 2021). Contoh dompet digital Indonesia adalah OVO, GoPay, dan DANA.

4. Kode QR

Pembayaran nontunai juga bisa dilakukan dengan kode QR. Dalam hal ini, pembeli memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital dan melakukan otorisasi pembayaran.

2.2.3 Sistem Pembayaran Menurut Perspektif Islam

Saat ini, perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi mengalami perubahan signifikan pada sistem pembayaran yang sebelumnya mengandalkan uang fisik dan beralih ke pembayaran nontunai. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong perbankan sebagai pendukung pembangunan nasional untuk mengembangkan pelayanan baik bagi konsumen maupun nasabahnya (Solihin, 2021).

Dari sudut pandang Islam, sistem pembayaran didasarkan pada prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip tersebut mencakup larangan riba (bunga), ketidakadilan, dan spekulasi yang tidak jelas. Dengan berkembangnya metode pembayaran di Indonesia, mengalami perubahan yang sangat pesat seperti pembayaran non tunai, berkaitan dengan pembayaran yang menggunakan sistem elektronik atau non tunai.

Bank Indonesia merupakan sebaagai lembaga keuangan berkempetingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tersebut aman dan efisien saat digunakan oleh masyarakat. Transaksi dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan tanpa melalui proses otoritas terlebih dahulu. Selain itu, nasabah pengguna uang elektronik tidak ada hubungannya dengan rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu pengguna uang elektronik tidak perlu melakukan konfirmasi PIN untuk menggunakannya.

Islam menganggap uang elektronik legal atau diperbolehkan karena apapun diperbolehkan dalam muamalah selama itu berada dalam koridor kebenaran yang ditetapkan oleh syariah dan hukum. Uang elektronik hanyalah jenis uang baru di dunia yang terus berubah. Islam juga tidak mengutuk pencatutan layanan uang elektronik. Yang dilarang adalah mencoba membeli uang dengan uang, tetapi dengan uang elektronik pengguna membeli layanan “transaksi sederhana” penerbit jasa memperoleh keuntungan dari jasa yang mereka jual, sedangkan konsumen memperoleh keuntungan dari kemudahan penyedia layanan (Firdaus, 2018).

Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri dari akadnya, dan menurut bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Akad juga dapat diartikan sebagai sambungan. Arti dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya (muslich, 2013:43).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam Ijab Kabul, Ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut (Solihin 2021):

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, sebagai contoh misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Fatwa Dewan Syariah (DSN) tentang uang elektronik menyatakan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran apabila dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biasa rill, (untuk mendukung proses kelancaran dan penyelenggaraan uang elektronik) dan harus diserahkan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) menggunakan prinsip *fa'widh* (ganti rugi) ijarah (Firmansyah, Ihsan, 2018).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 bahwa uang elektronik yang dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut:

Uang Elektronik adalah cara pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Biaya layanan fasilitas sesuai dengan prinsip ganti rugi/*ijarah*
- b. Akad antara penerbit dengan pihak dalam penyelenggaraan e-money adalah *ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah* (akad dengan upah)
- c. Akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah wadiah atau qardh, karena nominal uang bisa digunakan atau ditariik kapan saja.
- d. Terhindar dari transaksi yang dilarang
- e. Dana ditempatkan di bank Syariah
- f. Jika kartu e-money hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Penggunaan teknologi modern sebagai alat pembayaran non tunai berkembang pesat dengan berbagai inovasi sehingga lebih efisien, aman, cepat dan nyaman. Saat ini, muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (*E-money*). Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet secara elektronik dengan menggunakan media kartu sebagai alat pembayarannya.

Penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama dilakukan melalui kartu kredit dan kartu debit, namun berbeda dengan dua kartu tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik merupakan kartu prabayar yang dapat digunakan secara offline tanpa tersambung dengan issuer serta pengguna tidak dibebankan dengan rekening, sedangkan kartu kredit/debit

merupakan kartu Prabayar dan Pascabayar yang digunakan secara online serta dibebankan rekening (Solihin, 2021).

2.3. Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

2.3.1 Quick Response Code

Quick Response Code atau disebut kode QR adalah sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Jenis barcode ini awalnya digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang layanan bisnis dan jasa untuk aktivitas marketing dan promosi. Dasarnya bahwa kode QR dikembangkan sebagai suatu kode yang memungkinkan isinya untuk dapat diterjemahkan dengan kecepatan tinggi. Tidak seperti kode batang yang menyimpan informasi hanya secara horizontal, kode QR dapat menyimpan informasi secara horizontal dan vertical, sehingga kode QR secara otomatis dapat memuat lebih banyak informasi daripada kode batang (Rouillard, 2008: 50).

Kode QR dapat dihasilkan menggunakan generator kode QR online, aplikasi *smartphone*, atau perangkat lunak komputer khusus. Mereka dapat digunakan oleh individu, bisnis, dan organisasi untuk memberikan informasi tambahan, mengarahkan pengguna ke situs web, dan menyediakan cara mudah untuk bertukar kontak dan data lainnya.

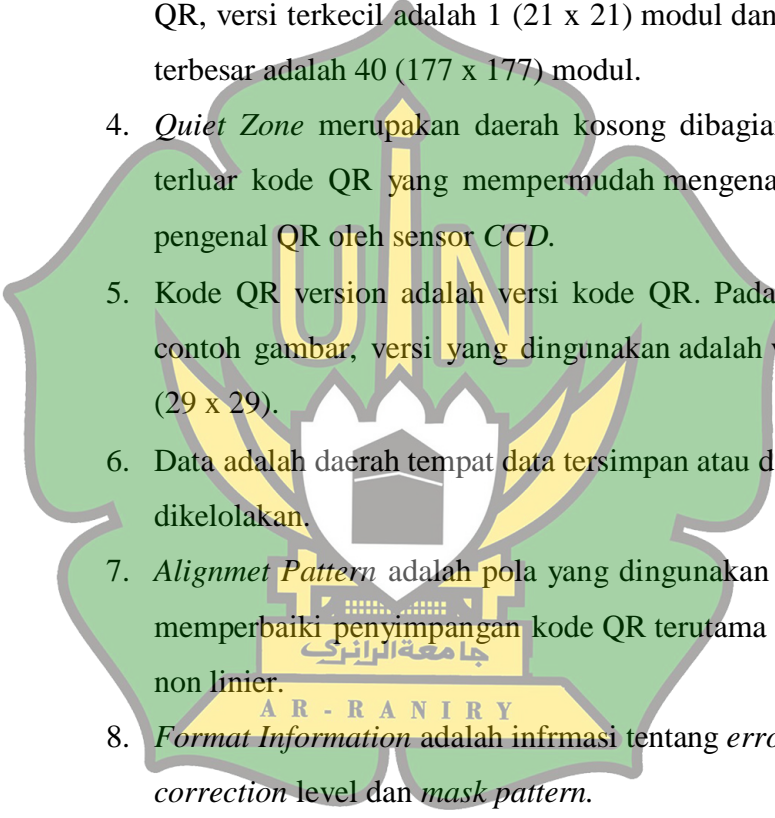
Kode QR adalah bentuk kode matriks dua dimensi yang dapat dengan mudah dibaca oleh smartphone dan kamera digital. Kode QR berisi informasi berupa teks atau URL yang dapat dibaca oleh alat pemindai kode QR. Kode QR dapat digunakan untuk berbagai tujuan, untuk membuka situs web, mengakses informasi produk, membagikan kontak, membayar barang, dan sebagainya. Kode QR terdiri dari sebuah untai kotak persegi yang disusun dalam suatu pola persegi yang lebih besar, yang disebut modul.

Gambar 2.1
Struktur Kode QR



Di bawah ini adalah penjelasan istilah-istilah terkait dengan gambar di atas (Ariadi, 2011)

1. *Finding Pattern* adalah pola untuk mendeteksi posisi dari kode QR

- 
2. *Timing pattern* adalah pola yang digunakan untuk identifikasi koordinat pusat dari kode QR, dibuat dalam bentuk modul hitam putih bergantian.
 3. *Version Information* adalah Versi dari sebuah kode QR, versi terkecil adalah 1 (21 x 21) modul dan versi terbesar adalah 40 (177 x 177) modul.
 4. *Quiet Zone* merupakan daerah kosong dibagian terluar kode QR yang mempermudah mengenali pengenal QR oleh sensor CCD.
 5. Kode QR version adalah versi kode QR. Pada contoh gambar, versi yang digunakan adalah versi 3 (29 x 29).
 6. Data adalah daerah tempat data tersimpan atau data dikelola.
 7. *Alignmet Pattern* adalah pola yang digunakan untuk memperbaiki penyimpangan kode QR terutama distorsi non linier.
 8. *Format Information* adalah informasi tentang *error correction level* dan *mask pattern*.

2.3.2 Pengertian Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Indonesia Standard disingkat QRIS (di baca KRIS) merupakan penyatuan berbagai jenis QR dari berbagai penyelenggara jasa. Sistem pembayaran (PJSP) yang menggunakan kode QR. QRIS diciptakan oleh industri kerangka

angsuran bersama dengan Bank Indonesia sehingga interaksi pertukaran dengan kode QR dapat lebih sederhana, lebih cepat, dan aman. Semua koperasi Spesialis Kerangka Angsuran yang akan menggunakan angsuran kode QR wajib menerapkan QRIS. (Rifqi, Pinondang, Pauer, 2021).

Bank Indonesia meluncurkan standard *Quick Response* (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi *e-money* berbasis server, *e-wallet*, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonsian Standard pada 17 Agustus 2019 di Jakarta bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu, ketentuan QRIS dapat dilihat pada NO.21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.

QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia bertujuan agar proses transaksi dengan kode QR menjadi lebih muah, cepat dan aman. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan kode QR diharuskan untuk menggunakan QRIS. Hal ini diatur dalam PADG No.21/18/2019 tentang Standar Internasional QRIS untuk pembayaran. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penjual dan pembeli serta meminimalisr kecurangan dalam melakukan transaksi. Semua peyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

yang akan menggunakan kode QR pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Saat ini, dengan QRIS seluruh aplikasi pembayaran maupun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat dapat digunakan di semua toko, pedagang, tiket wisata, donasi berlogo QRIS. Walaupun penyedia QRIS di *merchant* berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Merchant hanya dapat menerima pembayaran dari masyarakat melalui QR dari aplikasi maupun penyelenggaranya dengan cara membuka rekening pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin pada Bank Indonesia (Sulistiyowati, Pamungkas, 2022).

QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memfasilitasi pembayaran elektronik di Indonesia. Qris bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai metode pembayaran nontunai ke dalam kode QR yang dapat dibaca oleh aplikasi pembayaran apa pun yang kompatibel dengan standar QRIS. QRIS memungkinkan pengguna membayar menggunakan e-wallet, kartu kredit, transfer bank, atau menggunakan metode pembayaran yang lainnya hanya dengan memindai satu kode QR yang ada di toko atau tempat usaha. QRIS menyederhanakan proses pembayaran dengan menggabungkan informasi penting seperti nama merchant, nomor rekening, dan jumlah pembayaran dalam satu kode QR.

Tabel 2.1

Perbedaan Transaksi Sebelum dan Sesudah QRIS

Metode Transaksi Sebelum	Metode Transaksi Sesudah
Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastika bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada merchant.	Merchant tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu kode QR di toko dank ode QR dapat di scan oleh masyarakat dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone.

Sumber: www.bi.go.id

2.3.3 Jenis pembayaran menggunakan QRIS

QRIS (Quick Response Indonesian Standard) adalah standar Kode QR yang digunakan untuk pembayaran elektronik di Indonesia. QRIS memungkinkan konsumen melakukan pembayaran dengan dompet digital atau aplikasi mobile banking melalui pemindai kode QR.

Dibawah ini adalah jenis pembayaran yang dapat dilakukan dengan QRIS:

1. Pembayaran dompet digital: QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan aplikasi dompet digital seperti Go-Pay, OVO, Dana, dan LinkAja. Konsumen dapat memindai kode QR yang ditampilkan di toko dan melakukan

- pembayaran secara langsung dari dompet digital mereka.
2. Pembayaran Mobile Banking: QRIS juga mendukung pembiayaan melalui aplikasi mobile dari bank-bank yang terhubung. Konsumen dapat menggunakan aplikasi mobilr banking untuk memindai kode QR dan melakukan pembayaran langsung dari rekening bank mereka.
 4. Pembayaran Kartu Kredit atau Debit: Beberapa aplikasi dompet digital atau platform pembayaran juga memungkinkan pengguna menghubungkan kartu kredit atau debit mereka ke dompet digital mereka. QRIS memungkinkan konsumen melakukan pembayaran menggunakan dompet digital deengan memindai kode QR.
 5. Pembayaran Tagihan: Selain pembayaran di toko, QRIS juga dapat digunakan untuk membayar tagihan seperti tagihan listrik, air, dan telepon. Konsumen dapat dengan mudah membayar dengan memindai kode QR pada tagihan dengan dompet digital atau aplikasi mobile banking mereka.

Menurut Bank Indonesia dijelaskan bahwa terdapa tiga jenis pembayaran menggunakan QRIS, yaitu (Sihalaho,2020):

a. *Merchant Presented Mode (MPM)*

Merchant Presented Mode terdapat 2 bentuk yaitu statis dan dinamis. Karakteristik *Merchant Presented Mode* statis mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga QR Code. Setiap transaksi dicetak dengan QR Code yang berbeda. QRIS MPM Statis sangat cocok untuk usaha mikro dan kecil. Karakteristik *Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis*. QR dikeluarkan melalui perangkat seperti mesin EDC atau smartphone. Merchant harus memastikan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi

b. *Customer Presented Mode (CPM)*

Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan oleh aplikasi pembayaran pelanggan untuk discan oleh merchant. QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parker, dan ritel modern., mudah, dan aman melalui perangkat seluler. Quick Response Indonesian Standard (QRIS) memungkinkan pembayaran yang cepat. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada konsumen dan memperluas pilihan pembayar elektronik mereka di Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa

dompet digital atau aplikasi mobile banking yang digunakan terhubung dengan QRIS dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting sari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini karena UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industry berskala bsar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak (Yuli, 2020)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan (Suci, 2020).

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro yang diatur sebagaimana dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar.

Istilah UMKM di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut UUD 1945, yang kemudian diperkuat dengan TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Ekonomi Kerakyatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diberdayakan sebagai bagian integral dari perekonomian rakyat dengan kedudukan, peran, dan potensi

strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkeadilan, dan berkembang. Definisi UMKM juga ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan mengingat kondisi perubahan yang dinamis, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang, UU No 20 Tahun 2008 telah mengatur jenis usaha berdasarkan omset dan asset sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

N	Kriteria	A	O
1.	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5
3.	Usaha	>500 juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50

UMKM dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi yang terjadi. Saat badai krisis melanda Indonesia, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Oleh karena itu, ketika nilai tukar, perusahaan besar

yang biasanya selalu berurusan dengan mata uang asing yang paling berpotensi mengalami krisis (Erna dan apip, 2020).

2.4.2 Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peran masyarakat dalam perkembangan nasional utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sofyan, 2017)

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program seperti penyediaan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, pengembangan pasar, dan digitalisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan UMKM, serta mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Usaha mikro berperan penting dalam membangun perekonomian suatu Negara khususnya masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa depan. Dalam hal ini, usaha mikro memegang peranan yang sangat penting dalam

kegiatan perekonomian masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menunjukkan bahwa eksistensinya terbukti mampu dalam perekonomian di Indonesia dalam berbagai keadaan.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut (Adnan, 2016):

1. Posisinya sebagai pelaku ekonomi terkemuka di berbagai bidang.
2. Menyediakan lapangan pekerjaan terbesar.
3. Kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan masyarakat.
4. Pemrakarsa pasar baru dan sumber inovatif.
5. Melalui kegiatan ekspor, memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan neraca pembayaran

UMKM apabila dibandingkan dengan usaha yang berskala lebih besar mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga UMKM perlu didukung oleh informasi akurat dan memberikan perhatian khusus untuk mendapatkan jaringan pasar yang luas sehingga perkembangan pelaku usaha kecil menengah dapat berkembang dan mampu bersaing.

Perkembangan UMKM diharapkan memberikan kontribusi positif, yaitu pelaku usaha dominan (99,9%) menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp 4.869,57 triliun) dengan laju tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pertumbuhan sebesar 6,4% per tahun dari total ekspor nasional. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,23% menyumbang volume ekspor mencapai 14.06% (Rp 166,63 triliun) (Rp 830,9 triliun) secara geografis keberadaan UMKM tersebar di semua sektor (Kadeni, Srijani, 2020).

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) Posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor (2) Penyediaan lapangan kerja yang terbesar (3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat (4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi (5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Putra, 2016).

2.4.3 Karakteristik Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Jaka Sriyana (2016), karakteristik UMKM mencakup tingkat modal yang relative kecil, skala produksi yang terbatas, jumlah tenaga kerj yang terbatas, akses terbatas terhadap sumber daya finansial dan non-finansial, serta ketergantungan pada pasar local. Beberapa karakteristik UMKM termasuk

kepemilikan dan kontrol yang teralokasikan, sifat fleksibel dan adaptif, akses terbatas terhadap sumber daya skala operasional yang lebih kecil, dan orientasi yang lebih kuat pada pasar lokal (Marsden dan Robert L. Verburg (2017).

Ada 4 alasan untuk menjelaskan posisi strategis UMKM Indonesia. Pertama, UMKM tidak perlu modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memerlukan pendidikan formal khusus. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak membutuhkan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi (Sudati, 2019).

Karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah bersifat faktual dan melekat pada kegiatan usaha-nya maupun perilaku pengusaha itu sendiri. Karakteristiknya tersebut menjadi ciri yang membedakan antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Bank Dunia mengelompokkan UMKM menjadi tinggi jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro adalah usaha dengan jumlah karyawan 10 orang. 2. Usaha Kecil adalah usaha dengan jumlah karyawan 30 orang. 3. Usaha Menengah adalah usaha dengan jumlah karyawan 300 orang (Kadeni, Ninik, 2020).

2.4.4 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yaitu resesi ekonomi. Data Pusat Statistik merilis keadaan bahwa jumlah UMKM tidak berkurang bahkan setelah krisis ekonomi, jumlah UMKM justru meningkat secara keseluruhan bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.539.560 unit atau sebesar 4.968 unit usaha berskala besar (Suci, 2017).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah lama dikenal sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena peranannya yang riil dalam perekonomian. Berdasarkan pembentukan PDB sekitar 63,58%, kapasitas menyerap tenaga kerja sebesar 99,45% atau karena jumlah besarnya jumlah unit usaha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, sehingga pada sharenya yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total yang mencapai 18,72%.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada pertumbuhan, kemajuan, dan perubahan yang terjadi pada UMKM dari waktu ke waktu. Perkembangan UMKM mencakup berbagai aspek seperti jumlah dan ukuran

UMKM, kontribusi UMKM terhadap ekonomi, inovasi, akses ke pembiayaan, keterampilan pengusaha, dan dukungan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Perkembangan UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berikut adalah beberapa perkembangan yang terjadi dalam UMKM di Indonesia

1. Fokus pemerintah: Pemerintah di Indonesia harus memiliki fokus yang kuat untuk mendukung perkembangan UMKM, dengan cara seperti pengurangan birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan akses ke pembiayaan telah diambil untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
2. Program pemerintah: Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti program Kredit Usaa Rakyat (KUR), Kredit Mikro, Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai program pelatihan dan pendampingan.
3. Peningkatan Akses ke Pembiayaan: Akses terhadap pembiayaan menjadi faktor penting dalam perkembangan UMKM. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan melalui skema KUR dan berbagai program mikro.

4. Kemajuan Digitalisasi: Digitalisasi telah membawa peluang baru bagi UMKM di Indonesia. Melalui platform *e-commerce*, media sosial dan teknologi digital lainnya. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, mempromosikan produk, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.
5. Kemitraan dan Jaringan: Kerjasama antara UMKM dan pemangku kepentingan lainnya seperti perusahaan besar, lembaga pendidikan, dan organisasi industri, semakin berkembang. Kemitraan ini memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, dan pasar yang lebih luas bagi UMKM.
6. Perkembangan Pendidikan dan Pelatihan: Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha bisnis mendorong berkembangnya pendidikan dan pelatihan khusus bagi UMKM di Indonesia. Program-program pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan keuangan.
7. Fokus pada keberlanjutan dan Inovasi: UMKM di Indonesiasemakinsadar akan pentingnya keberlanjutan dan inovasi dalam berbisnis. Mereka mengadopsi praktik bisnis ramah lingkungan,

mengurangi limbah, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengembangkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dengan menambahkan variable dan metode penelitian yang berbeda yang didapatkan dari skripsi, jurnal, dan tesis. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi, acuan tau landasan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan Sihalaho, dkk (2020) penelitiannya yang berjudul Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard Bagi UMKM di Medan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard pada UMKM dan bagaimana implementasinya pada objek penelitian masing-masing. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada lokasi penelitian, dimana Sihalaho berlokasi di Medan, sedangkan peneliti di Aceh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) dalam penelitiannya berjudul QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. Persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama fokus mengkaji

mengenai Quick Response Indonesian Standard pada UMKM dan dampak pembayaran melalui QRIS. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, dimana penelitian Setiawan di Denpasar, sedangkan peneliti di Aceh, selain itu penelitian ini fokus pada penerapan QRIS terhadap UMKM di Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode kualitatif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2020) dalam penelitiannya berjudul Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan sama-sama berlokasi di Banda Aceh. Sedangkan, perbedaan penelitian sebelumnya fokus mengkaji mengenai perkembangan UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh, penelitian ini mengkaji penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuwana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Coronanomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pada pembayaran elektronik atau non tunai melalui Quick Response Code. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variable yang menjadi fokus kajian dalam penelitian Yuwana adalah aspek pemasaran dan transaksi pembayaran yang erat kaitannya

dengan peredaran barang dan omset usaha saat pandemi sedangkan penelitian ini tentang penerapan QRIS terhadap UMKM di Kota Banda Aceh.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Hardiky (2021), yang berjudul *Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, dimana fokus penelitian yaitu pembayaran digital melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya optimalisasi digital payment sebagai solusi pembayaran, sedangkan penelitian ini pembayaran non tunai melalui QRIS pada UMKM.

Tabel 2.3

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (tahun)/judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sihaloho (2020) Implementasi Sistem Pembayaran <i>Quick Response Indonesian Standard</i> Bagi Perkembangan UMKM di Medan	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode wawancara menjadi teknik untuk pengumpulan data pada penelitian ini..	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa pedagang UMKM di Medan telah menggunakan QRIS dilakukan karena keinginan para pedagang tersebut untuk mengikuti perkembangan

			teknologi dan informasi.
2.	Setiawan (2020) QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS	Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada UMKM dengan memanfaatkan <i>Google form</i> . Daftar pertanyaan pada kuesioner didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya	Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting untuk mendorong adopsi QRIS secara luas dikalangan UMKM. 1. Peningkatan secara terus menerus yang diperlukan agar fitur yang ditawarkan QRIS benar-benar dapat memberi berbagai manfaat. 2. Kemudahan penggunaan kecepatan proses transaksi dengan QRIS harus terus di tingkatkan. 3. Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait QRIS, manfaat dan kemudahan penggunaan QRIS.
3.	Pramono (2020) Perkembangan Usaha Mikro Kecil	Data yang didapatkan pada	Hasil penelitian menunjukkan UMKM di Kota Banda Aceh

	Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh tahun 2013-2019	penelitian ini melalui data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan rangkuman dari hasil wawancara.	mengalami perkembangan dari tahun 2013 sampai tahun 2019. UMKM memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Kota Banda Aceh.
4.	Yuwana (2020) <i>Coronanomics:</i> Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua pendekatan yaitu studi kepustakaan dan studi deskriptif menggunakan informan dari beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Jember.	Pandemu Covid-19 menyebabkan penurunan pada pasar. Beberapa UMKM harus berinovasi produk dan proses agar bisa bertahan di masa pendemi. Salah satunya yang dilakukan pelaku usaha di Kabupaten Jember. Selama pendemi melakukan pemasaran secara online melalui website dan media sosial.
5.	Hardiky (2021) Optimalisasi Digital Payment	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pemilihan	Banyak konsumen yang menggunakan pembayaran digital. Pemilik UMKM

	Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur	pada penelitian ini menggunakan selective atau subjektif sampling	menawarkan aplikasi baru berbasis barcode yang dikenal sebagai QRIS untuk meningkatkan penjualan. Pembeli tidak perlu khawatir akan kesulitan administrasi dengan adanya aplikasi ini.
--	---	---	--

2.6 Kerangka Berpikir

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah pembayaran menggunakan metode QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih cepat, mudah dan terjaga keamanannya. Dalam sistem pembayaran QR Code berkerja dengan menggunakan teknologi yang membantu perangkat dalam mengirim sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien dan mudah khususnya dalam transaksi pembayaran.

Kerangka ini bertujuan untuk menggambarkan konsep mekanisme penelitian yang akan dilakukan. Di dalam penelitian ini pada kerangka pemikiran menjelaskan penelitian ini pada sistem pembayaran pada Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh dengan sistem pembayaran yang terdpat 2 metode yaitu tunai dan nontunai. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada sitem pembayaran nontunai yaitu Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Penelitian ini

membahas mengenai implementasi QRIS Bank Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh. Adapun berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar kerangka diatas, peneliti bermaksud ingin meneliti bagaimana sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) ini mampu mendukung pelaku UMKM sehingga mempermudah akses atau transaksi pembayaran pada pelaku UMKM dengan konsumen begitupun peneliti ingin melihat kendala dalam penerapan lalu dapat ditemukan solusi agar *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Bank Syariah pada pelaku UMKM di kota Banda Aceh dapat diimplementasikan secara meluas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat ataupun perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang implementasi sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Bank Syariah yang dilakukan oleh para pemilik UMKM di Kota Banda Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi yang dilakukan pada para pemilik UMKM di Kota Banda Aceh. Sasaran yang digunakan oleh peneliti adalah para pemilik UMKM yang ada pada Kota Banda Aceh. Kemudian untuk data sekunder adalah data yang diperoleh baik dari lapangan maupun luar lapangan yang dimana ini berkaitan dengan masyarakat terkait dengan penggunaan produk QRIS.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi sistem pembayaran. Kemudian menurut Arikunto (2016) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) pemilik UMKM di Kota Banda Aceh.

Daftar UMKM yang diwawancarai

No	Nama UMKM	Nama Pemilik UMKM	Bidang Usaha
1	ZAAHIRA Boutiq	Reni	Usaha Baju
2	PERA Collections	Pera	Usaha Baju
3	Ryan Kue Khas Aceh	Dewi	Usaha Souvenir
4	Alif Souvenir Aceh	Putri	Usaha Souvenir

5	Nurul Cosmetic	Nurul	Usaha Kosmetik
6	Yashoutfit	Aulia	Usaha Kosmetik
7	Kirana Jaya	Fitri	Usaha Kelontong
8	MP. JAYA	Safrizal	Usaha Kelontong
9	WARMINDO Pak Yan	Ibu pakyan	Usaha Makanan
10	Sushi Me	Fira	Usaha Makanan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan, sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah berupa perbincangan dengan tujuan dan maksud tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden saling berhadapan dan mengumpulkan informasi secara lisan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan pertanyaan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pelapor untuk meneliti dan memperoleh informasi yang relevan sehubungan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan Gunakan panduan wawancara untuk membantu kemajuan peneliti pertanyaan penelitian tentang kebutuhan informasi diinginkan.

Wawancara didasarkan pada sejumlah pertanyaan yang tercantum dalam panduan wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan di luar yang termasuk dalam panduan wawancara untuk penelitian lebih lanjut. Dalam wawancara setiap topik penelitian berbeda-beda, ada wawancara lebih dari satu sumber tergantung pada kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun kriteria informan/narasumber dalam penelitian ini yang peneliti anggap mampu dalam memberikan data dan informasi antara lain, yaitu:

1. Pemilik UMKM yang berada di Banda Aceh
 - a) Sektor usaha makanan
 - b) Sektor usaha baju
 - c) Sektor usaha kosmetik
 - d) Sektor usaha souvenir atau oleh-oleh
 - e) Sektor usaha kelontong/toko
2. UMKM yang menggunakan produk QRIS
3. Sudah menggunakan produk QRIS minimal 1 Bulan
4. Aplikasi QRIS di implemasikan dengan konsumen
5. Praktisi Bank

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif,

analisis data harus seiring dengan pengumpulan data-data di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisa sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan dengan penelitian secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda - benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh

4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh sekaligus sebagai pusat pemerintahan Aceh. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara (LU) dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur (BT) dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2022 menurut BPS adalah 257.635,00 dan terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Baiturahman, Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, Ulee Kareng dengan 17 kemukiman dan 90 gampong dengan luas wilayah keseluruhan Kota Banda Aceh $\pm 61,36$ km². Kecamatan yang paling banyak penduduk tahun 2022 adalah kecamatan Kuta Alam yaitu 42.749 diikuti oleh kecamatan Syiah Kuala 33,289 dan yang paling sedikit adalah kecamatan Kuta Raja dengan jumlah 15,769.

Banda Aceh dikenal sebagai kota yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kesultanan,

Banda Aceh dikenal dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kota ini didirikan oleh Sultan Johan Syah pada hari jumat tanggal 1 Ramadhan 610 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh saat ini berusia 818 tahun. Banda Aceh adalah salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah, hal ini karena Banda Aceh memegang peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/Indonesia.

Kota Banda Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah. Pada masa kejayaannya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, banyak pelajar yang datang dari Timur Tengah, India, dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Turki, Cina, Eropa, dan India.

Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang yang akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran budaya. Banda Aceh mempunyai sejarah yang panjang dan beragam. Kota ini milik Kesultanan Aceh yang berkuasa pada abad ke-16 dan ke-17 dan merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh, contohnya Budaya

Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bintai.

4.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

Menurut UU No 20 Tahun 2008 pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan bagian besar perekonomian nasional menjadi salah satu indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM sejauh ini terbukti menjadi katup pengaman dimana krisis melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah.

Pada tahun 1988, satu-satunya usaha yang mampu bertahan dari krisis ekonomi global hanyalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dimana UMKM ini juga menjadi penopang perekonomian negara sehingga dapat keluar dari krisis. Penyebab UMKM dapat berdiri kokoh ketika terjadi krisis moneter karena sebagian besar bahan baku yang mereka yang digunakan UMKM dalam proses produksi dari dalam negeri atau tidak diimpor, dan penjualan produk jadi dari hasil UMKM adalah didalam negeri sendiri atau tidak diekspor.

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan perekonomian nasional. Tujuannya selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditunjukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar kelompok, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM sangat diperlukan agar UMKM tersebut semakin menyebar luas keseluruh penjuru Indonesia. Hal ini diperlukan agar perekonomian masyarakat Indonesia menjadi lebih stabil dan kuat, hal ini akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian negara. Pemerintah mempunyai peran dalam mendukung dan memotivasi pengembangan UMKM, dan para pelaku juga perlu kesadaran untuk mengembangkan usahanya.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan termasuk di Kota Banda Aceh dan dampak langsungnya adalah ekonomi daerah juga meningkat. Karena sebagian besar perputaran perekonomian berasal dari pelaku UMKM. Banda Aceh memiliki banyak UMKM yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. Berikut beberapa contoh jenis UMKM yang terdapat di Kota Banda Aceh:

1. Warung kopi dan warung makan: UMKM sektor makanan dan minuman merupakan yang paling banyak terdapat di kota Banda Aceh. Warung makan, kafe, dan warung kopi

biasanya menyajikan masakan lokal Aceh dan masakan Indonesia lainnya.

2. Kerajinan Tangan: Banda Aceh memiliki sejumlah UMKM yang fokus pada kerajinan tangan seperti songket, tenun, tas, dan produk tekstil lainnya.
3. Perdagangan: UMKM dalam sektor perdagangan seperti toko-toko kecil, pedagang pasar tradisional dan toko serba ada yang menawarkan berbagai produk kepada konsumen.
4. Pertanian: UMKM di sektor pertanian termasuk petani dan produsen produk-produk pertanian seperti sayuran, uah-buahan, dan hasil pertanian lainnya.
5. Penginapan: UMKM di sektor perhotelan dan akomodasi juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi kota . Ada banyak losmen, penginapan dan layanan akomodasi lain yang dijalankan oleh UMKM.

Menurut Usman (2020:8) menyatakan Usaha Mikro Kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh, diantaranya memberikan peran dalam penyerapan tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan juga menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 penduduk miskin di Kota Banda Aceh berada di angka 7,61 dan turun menjadi 7,13 pada tahun 2022. Penurunan tersebut tidak lepas dari pertumbuhan UMKM, karena sektor tersebut lebih banyak

menyerap tenaga kerja bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Banda Aceh.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh telah berkontribusi meningkatkan perekonomian di Aceh. Produksinya meningkat, pemasaran meluas, dan daya serap pekerjajapun bertambah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah menyelenggarakan acara Expo UMKM, Expo yang diselenggarakan merupakan apresiasi sekaligus wadah yang disediakan Pemerintah Aceh untuk mendukung eksistensi UMKM di Aceh. Acara Expo yang diselenggarakan tidak ada pemungutan biaya apapun untuk menempati stan yang sudah disediakan. Pemerintah ingin fokus pada pengembangan UMKM dengan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka bahwa produk-produk UMKM ini unyuk mendongkrak ekonomi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh mengatakan peran pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh sama pentingnya dengan peranan pihak swasta dalam menompang perekonomian di Aceh. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM akan terus membina dan mengembangkan UKM Aceh agar tetap produktif dan terus menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan mengadakan pelatihan merupakan salah satu hal yang penting agar pelaku UMKM dapat memperkuat branding dan kemasan produk agar tampil menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jual.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya adalah pembiayaan dan permodalan yang belum menjangkau seluruh pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan untuk pembiayaan ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki kebijakan melalui alokasi kredit usaha rakyat. Selain itu juga ada program CSR dari bank atau BUMN untuk mensrimulasi pembiayaan UMKM. Dan dalam hal permodalan pelaku UMKM tidak perlu berkecil hati dan tetap fokus pada pengelolaan dan manajemen usaha yang baik. Karena jika manajemen usahanya bagus, akses ke permodalan akan semakin terbuka.

Kendala lain yang sering dihadapi para pelaku UMKM adalah branding dan pemasaran, terutama ketika memasuki pasar digital yang berbasis teknologi informasi. Dengan adanya pelatihan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh adalah sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut dan direncanakan bisa dilakukan secara regular.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan ruang-ruang yang telah disediakan oleh pemerintah untuk membesarkan usahanya. Salah satunya adalah dengan adanya keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM yang menyediakan klinik gratis bagi setiap masyarakat yang ingin berkonsultasi perihal dunia UMKM.

4.2 Tahapan Pembuatan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*

Kemajuan industri teknologi informasi memaksa masyarakat semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan digital (*Financial Technology /Fintech*) termasuk salah satunya pelaksanaan transaksi pembayaran (*payment gateway*). Peningkatan akses teknologi dalam pembayaran digital non-tunai yang paling banyak digunakan saat ini adalah dompet digital (*e-wallet*).

Aplikasi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* merupakan standardisasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk efisiensi terhadap masyarakat Indonesia, karena Bank Indonesia tidak menginginkan infrastruktur yang mahal. Kode QR dirancang untuk semua tatanan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pedagang kecil yang tidak susah payah menggunakan investasi atau modal yang besar untuk dapat menggunakan QRIS untuk tujuan memperluas cakupan bisnis. Oleh karena itu, QRIS dapat dijadikan sebagai solusi dan inovasi pembayaran digital di Indonesia.

Adopsi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* oleh bank syariah merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung pembayaran non-tunai dan pertumbuhan ekonomi digital. QRIS memungkinkan berbagai lembaga keuangan, termasuk bank syariah untuk lebih mudah mengintegrasikan layanan pembayaran digital ke dalam operasi mereka sehingga memberikan manfaat bagi nasabah dan bisnis. Bank Syariah dapat menyediakan

kode QR yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sesuai hukum Islam

Quick Response Indonesian Standard (QRIS) terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi digital. Penggunaannya menjadi semakin penting dalam perekonomian Indonesia yang semakin terdigitalisasi. QRIS memungkinkan transaksi yang lebih aman karena tidak perlu memberikan rincian rekening bank atau informasi keuangan lainnya saat melakukan pembayaran. Data terkait pembayaran sudah ditenkripsi dalam kode QR. QRIS memberikan manfaat bagi pedagang UMKM maupun pemilik bisnis karena mereka dapat menerima berbagai metode pembayaran dengan satu kode QR, mengelola transaksi dengan lebih efisien dan mengurangi risiko penipuan.

Terdapat dua jenis pembayaran dalam sistem pembayaran menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), yaitu:

a. Pembayaran jenis konsumtif

Sistem pembayaran yang digunakan oleh para pelaku UMKM adalah pembayaran jenis konsumtif, jenis pembayaran ini digunakan untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumsi contohnya sistem pembayaran ini dapat di-*scan* pada *merchant* (pedagang) contohnya seperti rumah makan, toko, dan lain-lain.

b. Pembayaran jenis amal ibadah

Sistem pembayaran ini digunakan masyarakat untuk keperluan beramal Ibadah contohnya berinfaq, zakat, sedekah. Sistem pembayaran ini dapat di-*scan* pada yayasan-yayasan sosial seperti masjid, badan amil zakat, wakaf, dan lain-lain.

Adapun tahapan pembuatan Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) adalah sebagai berikut:

a) Mengajukan rekening/Tabungan.

Pengajuan ini terbagi menjadi dua cara secara online dan secara langsung di Bank Syariah yang mau digunakan.

b) Registrasi *Mobile Banking*

c) Pengajuan permohonan mencetak barcode

1. Pelaku UMKM datang ke Bank Syariah yang ingin digunakan.
2. Membawa data diri seperti KTP, NPWP, dan Buku Tabungan sebagai syarat permohonan lalu juga diharuskan mengisi formulir permohonan.
3. Menganalisis jenis usaha, tempat usaha, dan memastikan objek usaha sesuai dengan standar syariah atau tidak.
4. Pihak Bank akan melakukan survei untuk memastikan sesuai tidaknya *mercharnt* dengan data yang diberikan oleh pelaku UMKM.
5. Setelah memenuhi syarat maka pihak bank akan melakukan proses pencetakan barcode lalu barcode siap digunakan.

Aplikasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) merupakan bentuk transaksi nontunai yang paling diminati dan digunakan saat ini karena memiliki banyak sisi positif. Selain menggunakan sistem pembayaran QRIS karena cepat, mudah dan efisien, QRIS juga memudahkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melacak semua transaksi. Hal ini dapat membantu dalam manajemen keuangan dan pelaporan yang lebih baik.

4.3 Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.

Perkembangan teknologi dan informasi yang maju akan membantu pertumbuhan pada pertumbuhan ekonomi digital dan percepatan inklusi keuangan suatu Negara. Salah satu bentuk implementasi teknologi informasi dengan pertumbuhan ekonomi digital adalah dengan adanya transaksi pembayaran non-tunai salah satu bentuk pada pembayaran non-tunai adalah uang elektronik yaitu *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia agar memudahkan para pedagang menggunakan transaksi online.

Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mulai menggunakan teknologi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) untuk memudahkan transaksi keuangan dan pembayaran elektronik. QRIS memungkinkan UMKM menerima berbagai bentuk pembayaran digital

menggunakan kode QR sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien. QRIS mengacu pada standar kode QR yang ditrtapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini memastikan seluruh kode QR yang digunakan di Indonesia memenuhi standar yang sama dan dapat dibaca oleh berbagai aplikasi dan sistem pembayaran.

Kerja sama antara para pelaku UMKM dan penyelenggara uang elektronik yaitu QRIS bisa mendukung perkembangan UMKM itu sendiri. Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh, seperti di kota-kota lain di Indonesia, telah berkembang seiring dengan pertumbuhan sistem pembayaran non-tunai. Tidak sedikit pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang juga sudah menggunakan sistem pembayaran QRIS.

Bedasarkan hasil wawancara beberapa responden ke beberapa pelaku UMKM seperti ibu AA selaku penjual kosmetik di daerah Lambhuk beliau menggunakan sistem pembayaran QRIS sejak tahun 2021. Ibu AA tertarik menggunakan sistem pembayaran QRIS awalnya karena mengikuti zaman yang sudah berkembang dan menggunakan aplikasi QRIS karena tidak perlu menyediakan berbagai kode QR dari berbagai penerbit. Begitupun halnya dengan ibu PR selaku penjual baju di pasar Aceh sudah menggunakan QRIS sejak tahun 2022 dengan menggunakan QRIS ibu PR mengatakan tidak perlu kesusahan mencari uang kembalian lagi. Dan juga ibu NL selaku penjual kosmetik di pasar Aceh sejak tahun 2022 mengatakan penggunaan QRIS membuat transaksi non-tunai

menjadi lebih cepat dan aman. Ibu PR dan ibu NL sudah mengetahui aplikasi QRIS sejak lama namun mereka baru tertarik memakai aplikasi QRIS ketika pegawai bank yang turun langsung ke toko-toko mereka untuk memberi tahu apa saja manfaat yang dirasakan ketika menggunakan transaksi pembayaran QRIS.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan UMKM rata-rata mereka sudah menggunakan aplikasi QRIS lebih dari setahun sebagai alat transaksi pembayaran nontunai di toko mereka. Para pelaku UMKM tidak kesusahan lagi dalam menyediakan berbagai macam kode QR seperti dari aplikasi OVO, Dana, LinkAja, Gopay dan Shopeepay karena penggunaan QRIS bisa menjangkau semua dari berbagai penyedia dan bisa digunakan di berbagai *merchant* berlogo QRIS walaupun konsumen memiliki aplikasi yang berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan oleh konsumen. Transaksi pembayaran menggunakan QRIS juga membuat lebih cepat, aman dan efisien.

Seperti halnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu PY selaku penjual WARMINDO beliau menyatakan bahwasannya pembayaran menggunakan aplikasi QRIS membuat pembayaran menjadi lebih aman dan cepat, dan juga dapat membantu pelaku UMKM menerima berbagai metode pembayaran nontunai dari konsumen sehingga lebih mudah dalam menarik konsumen. Saat ini mayoritas konsumen terutama generasi milenial dan gen z lebih suka melakukan pembayaran nontunai karena pembayaran yang memakai

aplikasi QRIS ini lebih cepat dan praktis. Bahkan konsumen menayakan apakah di toko tersebut dapat melakukan pembayaran melalui QRIS atau tidak. Karena hal tersebut, membuat para pelaku UMKM termotivasi untuk memiliki aplikasi QRIS.

Peneliti juga mewawancarai konsumen yang datang ke salah satu toko yang dijalankan oleh salah satu pelaku UMKM, konsumen tersebut berusia 22 tahun dimana konsumen tersebut menyatakan ia lebih senang melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS karena lebih praktis ia tidak perlu membawa banyak uang tunai. Tetapi penggunaan QRIS ini lebih didominasi oleh anak muda. Peneliti juga mewawancarai pelaku UMKM yang sudah ibu-ibu ia menyatakan mereka lebih senang membayar dan menerima pembayaran secara tunai ternyata karena pemahaman dan keterbatasan mereka dalam pengetahuan sistem pembayaran nontunai yang masih kurang.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan kebanyakan yang lebih senang menggunakan aplikasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) merupakan generasi milenial dan generasi z, karena mereka lebih paham akan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini perkembangan zaman semakin maju dan canggih kita berada di era digital. Era digital merujuk pada periode di mana teknologi informasi dan komunikasi terutama internet memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Generasi Z dikenal dengan digital native. Mereka merupakan generasi yang paling cepat beradaptasi bahkan

berinovasi dalam perubahan sistem pembayaran yang sudah semakin terdigitalisasi. Bagi generasi milenial dan generasi Z penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari bukan hal yang asing. Berdasarkan survei PwC tentang *Global Consumer Insight*, sistem pembayaran digital berubah menjadi tren, bahkan saat ini mendapatkan istilah *cashless society* (masyarakat non-tunai).

Pembayaran digital nontunai atau sering disebut pembayaran digital adalah salah satu aspek yang mengalami perkembangan pesat dalam era digital, perkembangan dalam pembayaran nontunai salah satunya adalah menggunakan kode QR. Penggunaan kode QR dalam pembayaran semakin banyak ditemui, konsumen dapat membayar dengan mengarahkan kamera ponsel mereka ke kode QR yang terbaca hal ini memudahkan proses pembayaran di berbagai tempat. Perkembangan ini akan terus berlanjut dengan adanya inovasi baru yang ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterhubungan dalam sistem pembayaran digital.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini menjadi tuntutan juga bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimana mereka harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang yang semuanya serba digital. Mengadopsi metode pembayaran digital dapat mempermudah proses transaksi bagi pelanggan dan membukakan peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan terbiasa akan perkembangan zaman, khususnya dalam hal digital tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga

membuka peluang baru. Oleh karena itu, investasi dalam pengetahuan dan penerapan teknologi dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi UMKM.

Bank juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank harus lebih meningkatkan literasi pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan QRIS. Bank dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang bagaimana cara menggunakan QRIS, baik dari sisi penjual maupun sisi konsumen dan juga melibatkan tentang cara membuat dan membaca kode QR, proses transaksi, dan manfaat pembayaran nontunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pada BSI mengatakan mereka sudah berupaya melakukan promosi dengan mendatangi setiap tempat usaha satu persatu menawarkan produk agar lebih efektif dikarenakan memungkinkan pihak bank dapat langsung bertemu dengan pelaku UMKM, sehingga dapat menjelaskan produk QRIS kepada pelaku UMKM secara lebih spesifik dan lebih detail serta dapat mengetahui kondisi dilapangan. Pihak bank juga melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tidak hanya terhadap pelaku UMKM dan juga melakukan promosi penjualan ketika diadakan event-event setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada UMKM yang ada pada stand bank tersebut melalui QRIS akan mendapatkan diskon.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sistem pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh sangat membantu pelaku UMKM dalam melakukan transaksi non-tunai. Penggunaan Sistem pembayaran QRIS ini dinilai lebih praktis dan efisien, karena para pelaku UMKM tidak perlu menyediakan berbagai kode QR dari beberapa aplikasi untuk pembayaran non-tunai dan konsumen hanya perlu memindai kode QRIS melalui smartphonanya masing-masing guna menyelesaikan transaksi. Dari segi konsumen juga lebih menyukai melakukan transaksi melalui QRIS karena lebih mudah dan cepat terutama generasi milenial dan generasi z dikarenakan mereka terbiasa dengan teknologi pastinya lebih mengerti bahwa penggunaan QRIS lebih sederhana dibandingkan pembayaran tunai.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho (2020) tentang penerapan Sistem pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa QRIS memiliki manfaat untuk para pelaku UMKM untuk mengalami perkembangan teknologi dan informasi. Namun meskipun *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) memiliki sejumlah kelebihan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mengadopsi dan menggunakan QRIS.

4.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

Selain banyaknya manfaat yang didapatkan setelah menggunakan transaksi pembayaran QRIS terdapat fakta dilapangan tidak sedikit juga para pelaku UMKM mengalami kendala dalam penerapan QRIS. Berdasarkan hasil wawancara dari para pelaku UMKM terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan digital.

Pemahaman terhadap keuangan digital menjadi sangat penting karena saat ini kehidupan kita semakin terhubung dengan teknologi. Pemahaman tentang literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan alat-alat dan layanan keuangan digital secara efektif. Pemahaman ini melibatkan konsep keuangan dan teknologi digital. Pemahaman terhadap teknologi digital yang digunakan dalam konteks keuangan misalnya seperti dompet digital dan aplikasi pembayaran.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Banda Aceh bahwasannya masyarakat memang masih kurang dalam literasi keuangan digital. Seperti pernyataan ibu DW dan ibu PT sebagai penjual oleh-oleh di pasar Aceh mengatakan bahwa masih ada konsumen yang tidak mengerti bagaimana cara transaksi pembayaran melalui

QRIS. Terutama konsumen yang dari kota-kota kecil dan ibu-ibu. Sedangkan ibu RN yaitu seorang penjual baju di pasar Aceh, ia mengatakan bahwa ia sendiri belum sepenuhnya memahami bagaimana cara kerja aplikasi QRIS padahal pada toko tersebut memiliki barcode QRIS namun ibu RN tidak mengerti bagaimana cara mengimplementasikannya ia hanya memberikan konsumen yang ingin membayar menggunakan QRIS ketika ada anaknya.

Hal ini dikarenakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat di Banda Aceh dan kurangnya sosialisasi oleh pihak penyelenggara QRIS, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi kurang memahami sistem kerja dari pembayaran QRIS.

Hal ini sejalan oleh temuan pada penelitian nanda dkk (2023) literasi keuangan yang rendah dan berdampak resistensi masyarakat dalam penggunaan QRIS. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan resistensi diantaranya adalah kurangnya edukasi pembayaran elektronik sehingga tingkat literasi keuangan digital masyarakat Banda Aceh tergolong rendah dan kebiasaan masyarakat membawa uang tunai.

2. Koneksi internet yang masih kurang stabil.

Dalam melakukan transaksi nontunai menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) kekuatan jaringan internet yang kurang baik di beberapa tempat menyebabkan terhambatnya proses transaksi. Jaringan internet sangat dibutuhkan ketika menggunakan QRIS karena QRIS adalah suatu sistem pembayaran digital yang memerlukan koneksi jaringan agar berjalan dengan efektif. Untuk melakukan transaksi QRIS sistem perlu menghubungkan data antara pihak pembayaran dan penerima pembayaran. Koneksi jaringan memungkinkan verifikasi transaksi secara langsung dan instan.

Seperti yang dinyatakan oleh bapak SZ selaku pedagang kelontong dan ibu FR yang menjual makanan dari hasil wawancara mengatakan pada saat mati lampu koneksi sinyal susah dan kadang menghilang, ketika bermasalah koneksi jaringan transaksi menggunakan QRIS tidak dapat dilakukan karena memerlukan koneksi internet yang baik saat memindai atau scan kode. Saat konsumen ingin bertansaksi menggunakan QRIS jika koneksi internet buruk maka konsumen tidak dapat bertransaksi menggunakan QRIS.

3. Pencairan dana yang ada pada *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS).

Saat menggunakan transaksi menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pelaku UMKM tidak bisa langsung mencairkan uangnya melainkan harus menunggu. Kebijakan pencairan dana dari penyedia layanan atau bank yang terlibat dalam transaksi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) juga dapat mempengaruhi waktu pencairan. Beberapa bank atau penyedia layanan mungkin memiliki waktu pemrosesan yang berbeda-beda karena melibatkan proses verifikasi keamanan tambahan, terutama untuk jumlah transaksi yang besar.

Berdasarkan wawancara kepada ibu PR, beliau mengeluh karena dana yang ada pada QRIS tidak bisa dicairkan langsung pada hari itu juga. Jadi, disaat pelaku UMKM sedang membutuhkan uang pada hari itu juga, uang tersebut tidak bisa langsung ditarik di hari itu juga.

4. Pengenaan biaya layanan.

Adanya biaya layanan sebesar 0,3% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) merupakan kendala yang terjadi saat ini bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank Indonesia mengenakan biaya layanan untuk transaksi pembayaran elektronik di

Indonesia, biaya ini dikenakan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung sistem pembayaran nontunai dan mendorong adopsi QRIS sebagai metode pembayaran yang lebih umum di masyarakat.

Dari hasil wawancara hampir semua pelaku UMKM yang di wawancarai mengeluh karena adanya biaya layanan ini, bagi mereka biaya layanan ini membebankan. Ibu YT salah satunya, ia mempunyai toko kelontong ibu YT mengatakan bahwa untuk biaya yang layanan yang diberikan oleh bank Indonesia memberatkan pedagang apalagi pedagang UMKM. Dengan adanya biaya pelayanan sebesar 0,3% ini para pelaku UMKM mengalami ketidakpuasan terhadap *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*.

Seiring dengan tujuan dari Aplikasi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*, penerapan sistem pembayaram *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* juga mengalami kendala bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu FN selaku pegawai bank di BSI ia mengatakan memang masyarakat masih kurang dalam memahami sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman terhadap QRIS. Literasi keuangan yang baik penting untuk memahami cara menggunakan alat pembayaran digital dan memahami implikasi keuangan dari setiap

transaksi. Ibu FN juga menyadari kendala masyarakat enggan menggunakan QRIS ini karena kendala teknologi, kurangnya aksesibilitas atau ketidakpahaman terhadap manfaat QRIS. Ibu FN juga mengatakan untuk kendala yang terjadi saat ini biaya layanan sebesar 0,3% namun biaya layanan tersebut bisa dijadikan suatu investasi bagi pelaku UMKM karena aplikasi QRIS dapat memberikan nilai tambah dalam hal kemudahan pengelolaan transaksi, pelacakan, penjualan, dan pemberdayaan UMKM untuk berkembang.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan secara umum, kendala yang terjadi adalah pemahaman literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah, secara konseptual literasi keuangan digital merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat baik pelaku UMKM maupun konsumen. Dan adanya keluhan karena tidak bisa langsung mencairkan uang dihari itu juga terkadang membuat pelaku UMKM malas untuk menerima transaksi menggunakan QRIS karena disaat pelaku UMKM sedang memerlukan uang, uang tersebut tidak bisa ditarik dihari itu juga.

Namun kendala yang terjadi saat ini adalah adanya biaya pelayanan sebesar 0,3% yang diberlakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari nilai transaksi pembayaran. Hal ini menyebabkan pendapatan harian pelaku UMKM akan berkurang dan juga berpotensi pelaku UMKM meninggalkan QRIS. Karena, sekecil apapun biaya yang dikenakan tetap akan terasa membebani pedagang apalagi UMKM. Kebijakan

pengenaan biaya layanan sebesar 0,3% ini kurang tepat karena bakal mengurangi jumlah pengguna layanan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) hingga memperlambat adaptasi pembayaran digital.

Bank Indonesia mengeluarkan QRIS agar para pelaku UMKM dapat melakukan proses transaksi yang lebih mudah, cepat, dan juga terjaga keamanannya. Namun pengenaan biaya ini akan membuat pelaku UMKM kembali ke masa lalu dengan memilih menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Dan juga masih ada persepsi masyarakat yang menganggap QRIS bukanlah aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, hal ini karena masih banyak masyarakat yang asing dengan sistem *digital payment*. Padahal QRIS diharapkan bisa mempercepat perkembangan sistem pembayaran non-tunai dan juga masyarakat masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Setiawan (2020) yang menyebutkan bahwa alasan terjadinya kendala dalam mengimplementasikan QRIS adalah koneksi internet yang tidak stabil dan pengenaan biaya penggunaan QRIS terhadap pembayaran non-tunai. Seperti yang kita ketahui jika koneksi internet hilang transaksi tidak dapat dilakukan dalam penelitian tersebut menuliskan pernyataan *Word Economic Forum* yang mengungkapkan bahwa sebagian besar transaksi di Negara-negara berkembang memiliki nilai rendah namun volume yang tinggi. Dibutuhkan investasi awal yang besar untuk peralatan dan

infrastruktur jaringan/koneksi internet serta sumber daya untuk mendukung volume transaksi yang tinggi.

4.2.3 Strategi dan solusi agar *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diimplementasikan secara meluas

Untuk mendukung perkembangan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dan mengurangi kendala yang terjadi dalam implementasi QRIS agar sistem pembayaran QRIS dapat diimplementasikan secara meluas pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperlukan strategi dan solusi yang mendukung. Strategi tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan QRIS dan apa saja manfaat yang dapat dirasakan. Hal ini termasuk sosialisasi tentang cara membayar dan menerima pembayaran melalui QRIS. Sosialisasi ini juga mencakup kesadaran akan keamanan dan kemudahan dalam menggunakan QRIS. Hal ini dilakukan agar pandangan masyarakat terhadap QRIS baik maka grafik perkembangan QRIS juga akan meningkat.

Selain itu, koneksi internet yang buruk atau tidak stabil maka strategi pemerataan jaringan perlu dilakukan agar masyarakat tidak lagi asing dengan istilah *digital payment*. Bank Indonesia dapat meninjau ulang besarnya biaya layanan yang dibebankan pada *merchant*, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena kendala yang saat ini sedang dihadapi adalah biaya tersebut. Beberapa pelaku UMKM merasa biaya tersebut masih

memberatkan. Dengan begitu, perkembangan QRIS akan semakin maju dan terus meningkat.

Adapun strategi/solusi yang perlu dilakukan oleh Bank berdasarkan wawancara pada salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia yaitu ibu FN bagian customer service adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada masyarakat.

Sosialisasi pada masyarakat terkait penggunaan pembayaran QRIS untuk bertransaksi dan memberi tahukan semua transaksi yang menggunakan QRIS menjadi lebih mudah. Meningkatkan sosialisasi QRIS pada masyarakat dapat mendukung perkembangan sistem pembayaran digital dengan sosialisai QRIS juga dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital. Hal ini melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku UMKM dan konsumen untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Tujuan dari melakukan sosialisasi adalah untuk membantu masyarakat memahami betapa cepat dan mudahnya menggunakan QRIS dalam berbagai transaksi sehari-hari. Sosialisasi QRIS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan pembayaran digitsl. Edukasi mengenai praktik keamanan digital. Seperti melindungi informasi pribadi dan mengenali potensi penipuan.

2. Pengembangan jaringan internet di seluruh Aceh.

Hal ini agar tidak terjadi lagi kendala yang datang dari jaringan. Faktor jaringan menjadi salah satu kendala saat menggunakan transaksi QRIS. Meningkatkan pengembangan jaringan internet untuk QRIS memiliki sejumlah tujuan yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sistem pembayaran digital. Tujuan utama pengembangan jaringan internet adalah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.

Jaringan yang kuat dan luas memungkinkan lebih banyak masyarakat yang mengakses QRIS dari berbagai lokasi termasuk daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses internet, dengan begitu QRIS dapat diimplementasikan lebih luas. Dengan jaringan yang baik, pelaku UMKM dapat lebih termotivasi untuk mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran. Hal ini dapat memperluas penggunaan QRIS.

3. Memberi edukasi terhadap pelaku UMKM.

Edukasi yang diberikan seperti tentang banyaknya manfaat menggunakan QRIS yang tidak sebanding dengan biaya layanan sebesar 0,3% seperti proses transaksi lebih cepat dan mudah, terhindar dari uang palsu, dan juga dapat mencatat transaksi secara otomatis.

Memberikan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang manfaat menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* agar meningkatkan pemahaman terhadap teknologi pembayaran QRIS. Pihak bank dapat memberitahukan aspek keamanan dalam penggunaan QRIS, misalnya melalui enkripsi dan perlindungan data untuk meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap pembayaran QRIS dan juga menyoroti bahwa penerimaan digital seperti QRIS dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis dan menarik pelanggan yang lebih cenderung paham akan pembayaran digital seperti QRIS.

Dari hasil wawancara kepada pihak bank, strategi yang harus dijalankan oleh pihak bank agar penggunaan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* ini dapat diimplementasikan secara luas sudah baik. Pihak bank perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa saja manfaat yang dapat dirasakan ketika menggunakan QRIS. Transaksi yang menggunakan QRIS menjadi lebih mudah, aman, dan cepat. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengeluh karena adanya biaya layanan pada QRIS, harus diingat bahwa QRIS juga memiliki banyak manfaat. pelaku UMKM harus mempertimbangkan manfaat dalam penggunaan QRIS seperti efisiensi transaksi, kecepatan pembayaran, dan pemantauan secara real-time.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2021) yang menyebutkan bahwa strategi yang dapat dilakukan dengan bersosialisasi melakukan pendekatan secara khusus dengan masyarakat. Pendekatan tersebut merupakan strategi yang efektif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Banda Aceh, maka didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) saat ini sangat membantu para pedagang dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran nontunai karena QRIS dapat memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya sistem pembayaran QRIS pelaku UMKM tidak perlu menyediakan berbagai kode QR dari berbagai penerbit, tidak repot mencari uang kembalian, menghindari uang palsu, dan tidak mengantri lama. Saat bertransaksi menggunakan QRIS semua terasa lebih mudah dan lancar karena hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memindai kode QR menggunakan handphone. Mayoritas pengguna QRIS adalah generasi milenial dan generasi z karena mereka lebih paham akan teknologi dan digital.
2. Dalam penerapan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) tentunya mempunyai kendala.

Beberapa kendala yang terjadi ketika penerapan QRIS adalah:

- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk QRIS dan apa saja manfaat dan kemudahan yang didapatkan ketika menggunakan QRIS. Pemahaman terhadap literasi keuangan digital masih kurang baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen.
- Jaringan internet yang masih kurang stabil dapat menghambat proses transaksi menggunakan QRIS.
- Pencairan dana yang membutuhkan waktu tidak bisa langsung ditarik pada hari itu juga.
- Adanya biaya layanan yang dibebankan untuk para pelaku UMKM dari setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS.

3. Strategi yang perlu dilakukan oleh pihak bank agar penggunaan QRIS dapat implementasikan lebih luas untuk para pelaku UMKM maupun konsumen di Banda Aceh yaitu:

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) agar masyarakat paham betapa cepat dan efisiennya menggunakan produk QRIS.
- Mempercepat pengembangan jaringan internet atau meningkatkan pengembangan jaringan internet untuk *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

memiliki sejumlah tujuan yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sistem pembayaran QRIS.

- Memberi edukasi terhadap pelaku UMKM tentang banyaknya manfaat menggunakan QRIS yang tidak sebanding dengan biaya layanan sebesar 0,3%.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Sistem Pembayaran QRIS Bank Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh. Maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran dan masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah membahas secara rinci dan berfokus pada UMKM di lokasi yang berbeda agar dapat melihat implementasi dalam penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada Bank syariah untuk mendukung keuangan digital.
2. Untuk pelaku UMKM dan para pengguna yang sudah menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS untuk membantu Bank Syariah menghimbau atau mengajak masyarakat terdekatnya untuk menggunakan transaksi nontunai yaitu QRIS.

3. Bank Syariah harus memaksimalkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan segala perubahan yang mungkin akan terjadi karena teknologi informasi, agar memudahkan nasabah untuk mengakses semua fasilitas yang ditawarkan oleh Bank.



Daftar Pustaka

- Adnan. (2016). *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. Jurnal Analisis Sosisologi, 5(2):40-5.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Bandung:PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia (2020) *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*. Diambil pada 31 Mei 2023 dari <https://www.bi.go.id/idfungsi-utama/sistem-pembayaran>
- Budiarti. (2021). Financial Technology as Payment Methods in Digital era. *International journal of research and applied technology*. Universitas Komputer Indonesia, 9-16.
- Erna, Apip. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Hal 2.
- Firdaus, Ridwan. (2018). *E-money Dalam Perseptif Hukum Ekonomi Syariah*, Vol XIV, No 1.
- Firmansyah, Ihsan. (2018). *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV.Iqro Pernebitan.
- Jaka Sriyani. (2016). *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Produsen Makanan BerbahanBaku Lokal*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 2. No 1.
- Kadeni, Srijani. (2021). *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.

- Khusna, Pratama. (2021). *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah*.
- Lubis, Olivia, Susanto. (2020). Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II). *Jurnal Mahasiswa Fakultas: Jurnal FEB*, 1 (1), 604.
- Nanda, Evriyenni & Rahmi. (2023). Dampak Adopsi QRIS Pda UMKM di Sektor *Food and Beverage* di Banda Aceh. *JIMEBIS - Scienfic Journal of Student Islamic Economic and Business*, Vol 4 No 2.
- Nurjanah. (2021). *Analisis Potensi Pembayaran Non Tunai Pada Pedagang di Kota Langsa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 6. No 2.
- Rifqi, Pinondang, Pauer. (2021). *Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pematangsiantar*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 3. No 2.
- Rouillard, J. (2008). *Contextual QR Codes, Proceedings of the Third International Multi- Conference on Computing in the Global Information Technology*, ICCGI. Athens: Greece.
- Sihalaho, Josef Evan. (2020). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. *Jurnal Manajemen Bisnis*.

- Solihin, Raya. (2021) *Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perseptif Hukum Islam*, Vol 3, No .
- Suci. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*.
- Sudati. (2019). *UMKM sebagai Pilar Mmbangun Ekonomi Bangsa. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol 4. No 2.
- Sulistiyowati, Pamungkas. (2022). *Sosialisasi dan Pendampingan Para Pedagang Dalam Pemasangan QRIS Guna Mendukung Perekonomian Yang Kuat Di Kelurahan Danukusuman Surakarta*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, Vol 3. No 2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2016). *Praktek Bank Syariah Dan Tantangannya*.
- Tarantang, Jefry. (2019). *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. *Jurnal Al Qardh*, Vol.4.
- Wiroso. (2018). *Produk Perbankan Syariah*. Hal 78.

Lampiran

Lampiran 1 pedoman wawancara UMKM

1. Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2. Sejak kapan anda menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
3. Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
4. Menurut anda pendaftaran QRIS ini mudah atau sulit?
5. Kendala apa yang Anda alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
6. Manfaat apa yang ada rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
7. Untuk kedepannya, apakah Anda akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?

Lampiran 2 pedoman wawancara Praktisi Bank.

1. Bagaimana pendapat bapak dengan hadirnya produk QRIS?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bank dalam memasarkan produk QRIS?
3. Bagaimana pengawasan untuk setiap transaksi yang masuk melalui QRIS?
4. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran produk QRIS pada Bank?
5. Apa saja kendala nasabah saat ingin mendaftarkan produk QRIS?

Nama: Pera

Jabatan: Owner Pera Collections

Alamat: Pasar Aceh

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Pera	Saya mengetahui QRIS dari penjual lain yang menggunakan produk QRIS ini.
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Pera	Dari 2022
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Pera	Lebih praktis menggunakan QRIS kami tidak perlu mencari uang kembali dan membantu dalam pencatatan keuangan.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Pera	Tahapan pembuatan QRIS tidak sulit sangat mudah

9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
10	Pera	Kendala saat ini yaitu adanya biaya layanan jadinya saya ga memprioritaskan lagi membayar menggunakan QRIS
11	Syazana	Manfaat apa yang ada rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Pera	QRIS sangat membantu saya dalam transaksi karena lebih cepat tidak susah mencari uang untuk kembalian.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Pera	Untuk saat ini mungkin lebih baik transaksi tunai karena adanya biaya pada QRIS.

Nama: Aulia Damayanti

Jabatan: Owner Yashoutfit

Alamat: Lambhuk

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Aulia	Iya saya mengetahui QRIS dari media sosial
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Aulia	Dari tahun 2021
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Aulia	Lebih praktis menggunakan QRIS karena tidak perlu menyediakan banyak kode QR dan juga tidak perlu mencari uang kembali.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Aulia	Pembuatan QRIS mudah.
9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?

10	Aulia	Saat ini kendalanya karena adanya biaya layanan yang diberikan.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Aulia	Dengan adanya QRIS pembayaran menjadi lebih cepat dn mudah.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Aulia	Saat ini jika ada yang ingi membayar non tunai saya lebih menyuruh transfer saja jika bank yang dingunakan tersedia di toko.



Nama: Reni

Jabatan: Owner ZAAHIRA Boutiq

Alamat: Pasar Aceh

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Reni	Saya diberitahukan oleh anak saya kalau QRIS sekarang sedang ramai dipake oleh anak muda.
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Reni	Sejak tahun lalu
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Reni	Menurut saya lebih mudah secara tunai karena saya sudah tua jadi saya masih tidak terlalu pandai teknologi.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Reni	Tahapan pembuatan QRIS mudah karena orang bank langsung datang kesini.

9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
10	Reni	Ketika menggunakan QRIS mungkin terkadang jaringan lambat menjadi kendala.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Reni	Dengan adanya QRIS sebenarnya sangat membantu dalam pencatatan keuangan.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Reni	Bagi saya mungkin lebih baik transaksi secara tunai.

Nama: Nurul

Jabatan: Owner Nurul Cosmetic

Alamat: Pasar Aceh

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Nurul	Saya mengetahui dari media sosial
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Nurul	Dari tahun 2022
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Nurul	Menurut saya pakai QRIS karena tapi sekarang karena ada biaya jadi saya lebih menyarankan tunai saja.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Nurul	Sangat mudah karena orang bank langsung datang.
9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?

10	Nurul	Kendalanya mungkin masih ada yang belum mengerti cara transaksi QRIS dan juga sekarang adanya biaya layanan yang diberikan.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Nurul	Dengan adanya QRIS pembayaran menjadi lebih cepat, aman, dan mudah.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Nurul	Saat ini jika ada yang ingin membayar non tunai saya lebih menyuruh transfer saja jika bank yang digunakan tersedia di toko.

Nama: Safrizal

Jabatan: Pegawai toko kelontong MP. Jaya

Alamat: Pasar Al-Mahirah

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana bapak mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Safrizal	Saya mengetahui dari penjual yang lain.
3	Syazana	Sejak kapan bapak menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Safrizal	Awal tahun 2023
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Safrizal	Menurut saya pakai QRIS karena tidak susah payah mencari uang kembalian namun masyarakat lebih sering berbelanja melakukan pembayaran secara tunai.
7	Syazana	Menurut bapak pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?

8	Safrizal	Mudah karena orang bank langsung datang.
9	Syazana	Kendala apa yang bapak alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
10	Safrizal	Kendalanya saat mati lampu kadang koneksi sinyal susah dan adanya biaya yang diberikan.
11	Syazana	Manfaat apa yang bapak rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Safrizal	Dengan adanya QRIS pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah bapak akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Safrizal	Mungkin saat ini lebih baik menggunakan pembayaran secara tunai.

Nama: Yanti

Jabatan: Owner KIRANA JAYA

Alamat: Pasar Al-Mahirah

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Yanti	Saya mengetahui QRIS sudah lama saya melihat dari toko lainnya namun saya tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya.
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Yanti	Baru tahun ini
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Yanti	Kalau saya lebih suka memakai uang tunai saja.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Yanti	Mudah orang banknya langsung datang ketoko.

9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
10	Yanti	Kendalanya di biaya layanan jika ada yang bertaransaksi menggunakan QRIS kadang pemasukan tidak seberapa dan diptong lagi dengan adanya biaya tersebut.
11	Syazana	Manfaat apa yang bapak rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Yanti	Dengan adanya QRIS pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Yanti	Kalau bagi saya mungkin lebih baik menggunakan tunai saja.

Nama: Fira

Jabatan: Kasir Sushi Me

Alamat: Pango

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Fira	Saya sudah tau dari tempat makan lain yang sudah duluan memakai QRIS.
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Fira	Dari tahun 2022
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Fira	Menurut saya menggunakan QRIS karena setiap transaksi akan tercatat dan memudahkan untuk saya.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Fira	Tahapan pembuatan QRIS mudah tidak ribet.

9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
10	Fira	Kendalanya mungkin jaringan karena kan memerlukan koneksi internet.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Fira	Penggunaan QRIS sangat efisien dalam bertransaksi menjadi lebih mudah dan tidak ngantri lama.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Fira	Iya saya akan terus menerima pembayaran menggunakan QRIS.

Nama: Ibu pakyan

Jabatan: WARMINDO

Alamat: Peuniti

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Ibu pakyan	Saya mengetahui dari spanduk bank yang ada di jalan.
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran di toko ini?
4	Ibu pakyan	Sejak tahun 2022
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Ibu pakyan	Lebih praktis menggunakan QRIS penggunaan QRIS membantu saya
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Ibu pakyan	Tahapan pembuatan QRIS mudah.
9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?

10	Ibu pakyan	Kendalanya di jaringan menurut saya karena menggunakan QRIS membutuhkan koneksi internet.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Ibu pakyan	Penggunaan QRIS membuat jadi lebih aman dan cepat karena saya dapat menerima berbagai metode pembayaran dari beberapa aplikasi.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Ibu pakyan	Iya, saya akan terus menerima pembayaran menggunakan QRIS karena konsumen menanyakan apakah dapat membayar menggunakan QRIS atau tidak.

Nama: Putri

Jabatan: Pegawai Alif Souvenir Aceh

Alamat: Pasar Aceh

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Putri	Saya mengetahui saat orang bank datang ke toko menawarkan produk QRIS.
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Putri	Tahun 2022
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Putri	Lebih praktis menggunakan QRIS karena kami tidak susah mencari kembalian dan QRIS dapat scan menggunakan aplikasi e-wallet juga.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Putri	Tidak sulit karena orang bank langsung datang.

9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?
10	Putri	Bagi saya karena pencairan uangnya tidak bisa langsung ditarik harus menunggu beberapa hari.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Putri	Manfaatnya sangat membantu dalam bertransaksi nontunai tidak perlu menyediakan kode QR dari banyak aplikasi.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Putri	Iya saya akan terus menerima pembayaran menggunakan QRIS karena banyak juga konsumen yang ingin membayar menggunakan QRIS.

Nama: Dewi

Jabatan: Pegawai Ryan Kue Khas Aceh

Alamat: Pasar Aceh

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Dari mana ibu mengetahui produk QRIS apa dari media sosial atau lainnya?
2	Dewi	Saya mengetahui dari teman saya yang sudah duluan menggunakan QRIS
3	Syazana	Sejak kapan ibu menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran ditoko ini?
4	Dewi	Dari tahun 2022
5	Syazana	Dari segi penggunaan, lebih praktis menerima pembayaran dari pembeli pakai QRIS atau tunai?
6	Dewi	Lebih praktis dengan qris karena tinggal scan saja.
7	Syazana	Menurut ibu pengajuan pembuatan produk QRIS ini mudah atau sulit?
8	Dewi	Tahapan pembuatan QRIS tidak sulit.
9	Syazana	Kendala apa yang ibu alami dalam menggunakan QRIS sebagai alat untuk menerima pembayaran?

10	Dewi	Kendalanya menurut saya di jaringan internet dan juga masih ada konsumen yang belum tau apa itu QRIS.
11	Syazana	Manfaat apa yang ibu rasakan sejak menerima pembayaran menggunakan QRIS?
12	Dewi	Manfaatnya QRIS seperti alternatif pembayaran transaksi lebih cepat dan efisien.
13	Syazana	Untuk kedepannya, apakah ibu akan tetap menerima pembayaran QRIS dari pembeli?
14	Dewi	Iya saya akan terus menerima pembayaran menggunakan QRIS.

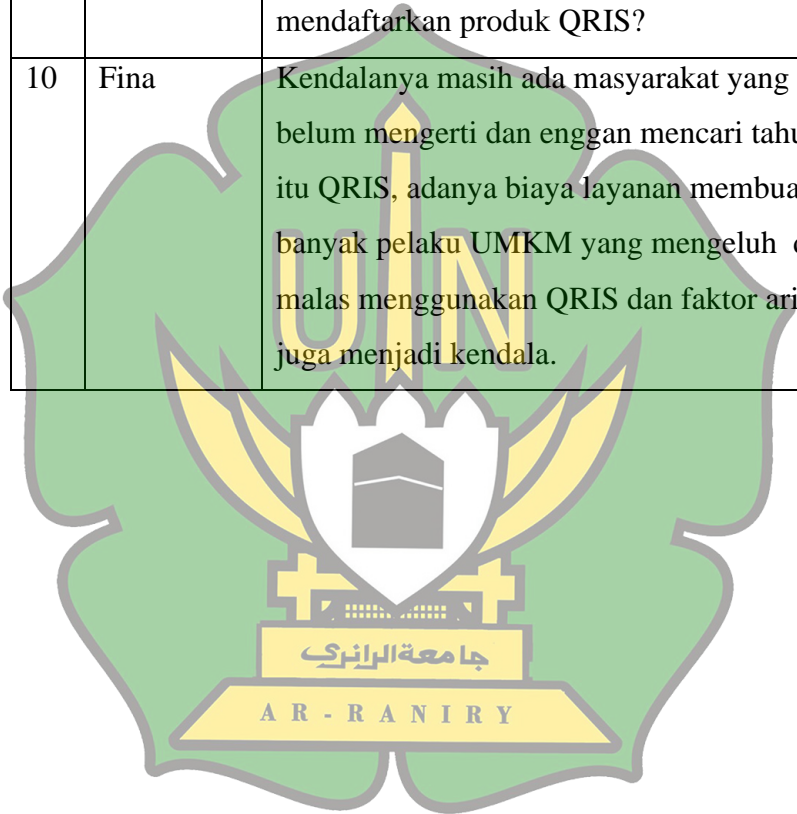


Nama: Fina

Jabatan: Pegawai Bank Syariah Indonesia

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Syazana	Bagaimana pendapat ibu dengan hadirnya produk QRIS?
2	Fina	Dengan hadirnya produk QRIS dapat memudahkan pelaku UMKM melayani konsumen yang tidak membawa uang cash. QRIS sangat membantu perkembangan UMKM di zaman serba teknologi.
3	Syazana	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bank dalam memasarkan produk QRIS?
4	Fina	Pihak bank secara langsung mensosialisasikan produk QRIS kepada masyarakat terutama pelaku UMKM
5	Syazana	Bagaimana pengawasan untuk setiap transaksi yang masuk melalui QRIS?
6	Fina	Setiap pelaku UMKM yang menggunakan produk QRIS memiliki aplikasi mobile banking dan setiap pembayaran tercatat dalam mobile banking.
7	Syazana	Bagaimanakah mekanisme pendaftaran produk QRIS di Bank Aceh?

8	Fina	Mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia, kalau tidak punya buku rekening maka terlebih dulu membuat buku rekening.
9	Syazana	Apa saja kendala nasabah saat ingin mendaftarkan produk QRIS?
10	Fina	Kendalanya masih ada masyarakat yang belum mengerti dan enggan mencari tahu apa itu QRIS, adanya biaya layanan membuat banyak pelaku UMKM yang mengeluh dan malas menggunakan QRIS dan faktor aringan juga menjadi kendala.



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Ibu Aulia
(Owner Yashoutfit)



Ibu Nurul
(Owner Nurul Cosmetic)



Ibu Putri
(Pegawai Alif Souvenir Aceh)



Ibu Dewi
(Pegawai Ryan Kue Khas Aceh)



Ibu Pera
(Owner Pera Collections)



Ibu Yanti
(Owner Karina Jaya)

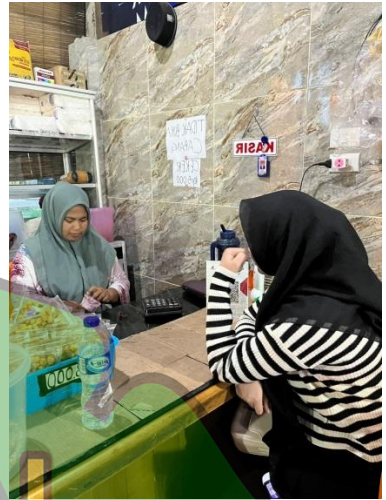


Bapak Safrizal
(Pegawai MP. JAYA)





Ibu Fira
(Kasir Sushi Me)



Ibu Pakyan
(Kasir Warmindo)



(Ibu Reni)
(Owner ZAHIRA Boutiqe)



Ibu Fina
(Praktisi Bank)